

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut. Penyajian data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen kuisisioner dan juga kualitatif ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif dari hasil wawancara serta dokumentasi, yang juga akan dilengkapi dengan tabel maupun grafik. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga data yang disajikan akan semakin mudah untuk dipahami.

Pada data yang diperoleh dari kuisisioner, jumlah responden yang berpartisipasi adalah sebanyak 94 orang. Penulis menggunakan metode analisa data kuantitatif, untuk mengetahui jawaban yang diberikan oleh responden data akan disajikan melalui tabel maupun grafik berdasarkan kategori pertanyaan masing-masing unsur.

Responden untuk wawancara terdiri dari tiga pihak yaitu KPU Kabupaten sleman selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Kedua, PPDI Sleman selaku pihak yang berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Dan ketiga masyarakat penyandang disabilitas sendiri sebagai pihak yang secara langsung mendapatkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum

A. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sleman yang sudah mempunyai hak pilih pada pilkada Sleman tahun 2015. Responden berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 94 orang. Selanjutnya responden didistribusikan menurut kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan juga jenis pekerjaan.

1. Deskripsi Responden Menurut Usia

Tabel 3.1
Distribusi Responden Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	17-27	30	32
2	27-37	34	36
3	37-47	21	22
4	47 keatas	9	10
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat distribusi responden menurut usia. Interval pertama 17-27 tahun sebanyak 30 orang atau 32 % dari total responden. Selanjutnya usia 27-37 tahun berjumlah 34 orang atau sekitar 36 % dari total responden. Interval usia 37-47 sejumlah 21 orang atau 22% dari total responden. Dan yang terakhir sejumlah 9 responden berusia 47 tahun keatas.

2. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.2
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	55	59
2	Perempuan	39	41
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat distribusi responden menurut jenis kelamin. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 55 orang atau 59 % dari total responden. Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sekitar 39 orang atau 41 % dari total responden

3. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SD	38	40
2	SMP	44	47
3	SMA	10	11
4	SMA keatas	2	2
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel tersebut dapat dilihat sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan. Responden dengan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 38 orang dengan presentase 40 % dari total responden. Selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah sebanyak 44 orang atau sebanyak 47 % dari total responden. Responden dengan tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sejumlah 10 orang atau sekitar 11 %

dari total responden. Dan sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan diatas tercatat sejumlah 2 orang atau sekitar 2 % dari total responden.

B. Hasil Penelitian

Bentuk-bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas terdiri dari tiga fase atau tahapan yaitu pra pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan. Masing-masing tahapan tersebut terdiri dari beberapa indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman 2015

1. Partisipasi Politik Pra Pemilihan

Pada tahap ini dapat dilihat partisipasi politik melalui keikutsertaan sosialisasi, motivasi diri terlibat politik, pemahaman akan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, keterlibatan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

a. Partisipasi dalam Sosialisasi Pilkada

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas Sleman dalam Pilkada 2015 Kabupaten Sleman adalah keikutsertaan dalam sosialisasi pemilu. Sosialisasi merupakan salah satu tugas KPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Pertanyaan yang diajukan adalah untuk mengetahui intensitas keikutsertaan penyandang disabilitas dalam sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU Sleman pada Pilkada 2015 silam.

Tabel 3.4
Distribusi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Pilkada Kabupaten Sleman

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak mengikuti	31	33
2	Kadang-kadang mengikuti	33	36
3	Mengikuti	23	25
4	Selalu mengikuti	7	6
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 33% (31 responden) menjawab tidak mengikuti kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU. Sebanyak 36% (33 responden) mengaku kadang-kadang mengikuti sosialisasi Pilkada. Dan 25% (23 responden) mengikuti kegiatan sosialisasi dan yang terakhir sebanyak 7 responden atau sekitar 6% menjawab selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Sleman.

Angka tersebut menunjukkan fakta bahwa keikutsertaan masyarakat penyandang disabilitas dalam sosialisasi Pilkada silam tergolong rendah dan belum maksimal. Beberapa kendala yang membuat keikutsertaan rendah salah satunya adalah karena aksesibilitas ke tempat sosialisasi dan juga informasi yang tidak merata. Beberapa responden bahkan mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi.

Selama ini KPU memang telah gencar melakukan sosialisasi khususnya bagi Penyandang disabilitas di wilayah Sleman. Hal ini dikonfirmasi oleh Indah Sri Wulandari S.E M.Sc selaku ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas KPU Kabupaten Sleman.

“kita sosialisasikan pilkada melalui berbagai LSM yang concern menaungi disabilitas Sleman. Diantaranya PPDI, Pertuni, ITMI, Gerkatina dan Sekolah

Semangat Tuli sebulan sekali. Sebelumnya kami juga melakukan audiensi bertepatan dengan Konvensi Masyarakat Sipil Jogja yang mempertemukan tokoh-tokoh LSM disabilitas” (wawancara Komisioner KPU Indah Sri Wulandari S.E M.Sc tanggal 8 Maret 2016)

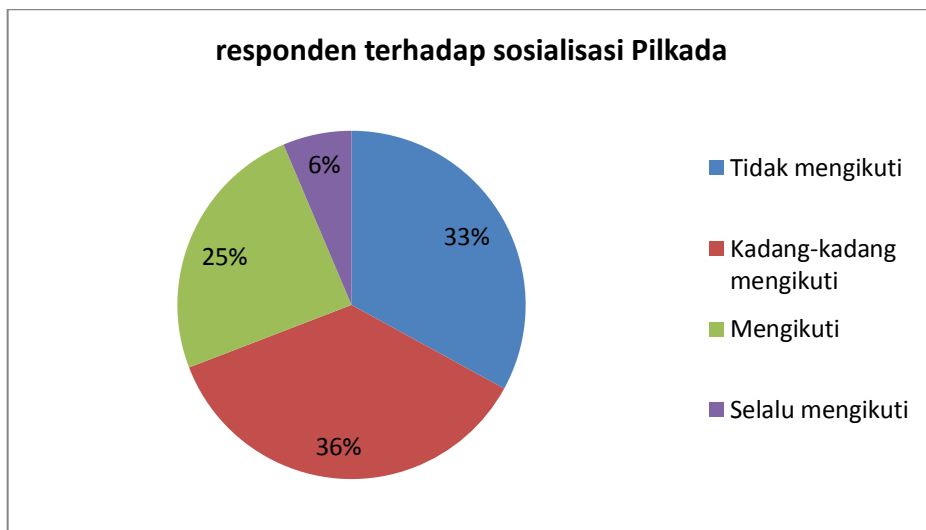
Selain itu sosialisasi untuk pemilih penyandang disabilitas dibantu oleh 20 (dua puluh) orang Relawan Demokrasi yang 6 (enam) diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hak-hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terus diperjuangkan karena dinilai mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan penyandang disabilitas. Akan tetapi sosialisasi tersebut dirasa kurang maksimal dan tidak representatif mewakili seluruh penyandang disabilitas karena selama ini dari aras lokal pendataan terkait DPT penyandang disabilitas tidak valid. Hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat penyandang disabilitas tidak menerima sosialisasi dikarenakan informasi yang minim dan keterjangkauan pihak KPU yang belum merata khususnya target sosialisasi masyarakat di fabel diluar organisasi.

Persiapan pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan panitia pelaksana pemilu yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya data yang diperoleh dilaporkan kepada KPU Kabupaten untuk ditetapkan sebagai pemilih.

“masalahnya ada di pendataan DPT yang dilakukan oleh masing-masing petugas PPDP, kadang dalam suatu daerah masih banyak penyandang disabilitas tapi tidak didata mas. Dari Dukcapil, dinsos maupun LSM datanya juga beda-beda, kita susah menjangkau target untuk melakukan sosialisasi” (wawancara Komisioner KPU Indah Sri Wulandari S.E M.Sc tanggal 8 Maret 2016)

KPU menyatakan bahwasanya melalui skema sosialisasi lewat organisasi dapat terjadi efek viral dari sesama kalangan disabilitas untuk menyebarkan informasi terkait dengan Pilkada. Akan tetapi pihak PPDI menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan efektif menjangkau masyarakat diluar organisasi. Untuk mengetahui partisipasi penyandang disabilitas terhadap sosialisasi pilkada dapat dilihat dari tabel berikut.

Grafik 3.1
Jawaban Responden Terhadap Sosialisasi



Pertanyaan: apakah anda mengikuti sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU?

b. Antusiasme terlibat proses politik

Indikator selanjutnya adalah motivasi diri untuk terlibat dalam proses politik dalam Pilkada Kabupaten Sleman 2015. Motivasi diri dalam hal ini antusiasme menjadi ukuran bagaimana masyarakat penyandang disabilitas memposisikan dirinya untuk terlibat dalam proses pemilu.

Tabel 3.5
Distribusi Jawaban Responden Tentang Motivasi Diri/antusiasme dalam
Pilkada

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak antusias	16	17
2	Sedikit antusias	22	23
3	antusias	45	48
4	Sangat antusias	11	12
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Data tersebut dapat terlihat bahwasanya masyarakat penyandang disabilitas mempunyai antusiasme tinggi untuk terlibat dalam proses politik dalam hal ini Pilkada Sleman 2015. Sekitar 60 % dari responden menjawab antusias dan sangat antusias. 22 responden menjawab sedikit antusias dan sisanya 16 responden menjawab tidak antusias dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sleman 2015.

Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah bahwa hak pilih merupakan hak setiap warga negara. Mereka berharap bahwa melalui pemilu hak-haknya dapat didengar layaknya masyarakat pada umumnya. Terdapat pemilih penyandang disabilitas yang orientasi memilih pada pemilu sebelumnya adalah uang, namun kemudian termotivasi untuk memilih guna memperjuangkan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

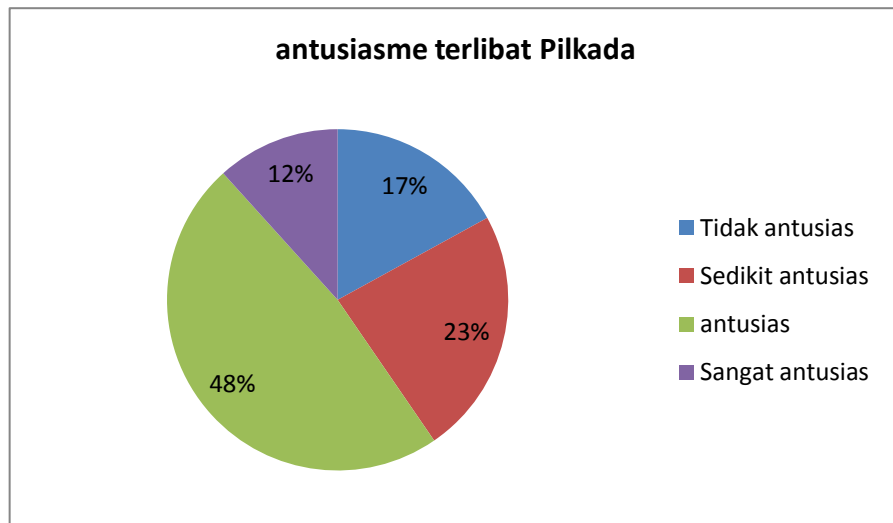
“saya nyoblos milih calon yang mau berjuang untuk kita. Biar orang-orang kaya saya ini lebih diperhatikan sama pemerintah. Kalo dulu saya nyoblos karena dikasih uang. Sekarang ndak” (wawancara Sarwanto penyandang daksa tanggal 14 Maret 2015)

Namun demikian, beberapa penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu bukan karena dorongan dari dirinya, namun dari

keluarganya. Hal ini dikarenakan keluarga yang membantu segala aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas secara mandiri.

Grafik 3.2

Jawaban Responden Tentang Motivasi Diri/antusiasme dalam Pilkada



Pertanyaan : apakah anda antusias untuk berpartisipasi dalam Pilkada?

c. Pemahaman akan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Dalam memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditelaah lebih jauh akan latar belakang serta visi misi yang diusung masing-masing kandidat. Pemahaman tersebut sangat diperlukan guna menetapkan standar maupun kriteria ideal seorang pemimpin dalam suatu wilayah sebagai pertimbangan pemberian suara dalam pemilu, tak terkecuali bagi mereka penyandang disabilitas.

Tabel 3.6
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemahaman Calon Kepala Daerah

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak tahu	26	28
2	Sedikit tahu	34	36
3	Tahu	27	29
4	Sangat tahu	7	7
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemahaman calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di kalangan masyarakat disabilitas masih minim. Hal ini dibuktikan dari 34 responden yang menjawab paham terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman. Sisanya 34 responden hanya mengetahui sedikit tentang calon tersebut bahkan 26 responden mengaku tidak mengetahui dan memahami siapa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sleman.

Hal ini terjadi dikarenakan minimnya informasi dan pemahaman yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas berkaitan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2015 lalu. seorang responden bahkan mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali calon Kepala Daerah yang akan dipilihnya.

“Sosialisasi dilaksanakan dari organisasi, namun sosialisasi masih kurang. Kita tidak diberi tinggalan contoh surat suara maupun daftar nama caleg, sehingga kita belum tahu sama sekali calon yang akan dipilih” (wawancara Margono penyandang netra tanggal 14 Maret 2016)

Dalam rangka mempermudah penerimaan materisialisasi, pihak KPU menyediakan alat peraga. Bagi penyandangdisabilitas rungu, sosialisasi dibantu dengan alat peraga berupa“Ular Tangga Pemilu”. Bagi penyandang disabilitas

netra, dilakukan simulasi menggunakan *template* dan bagi penyandang disabilitas wicara meminta bantuan guru untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas rungu dengan menggunakan isyarat. Selain itu terdapat CD (*compact disc*) sosialisasi yang berisikan informasi *audio visual* guna menjadi alat bantu sosialisasi terutama untuk penyandang disabilitas netra, rungu dan wicara.

“ untuk pilkada 2015 ini kita punya inovasi CD sosialisasi yang ditujukan untuk penyandang disabilitas netra, rungu dan wicara. Alat ini diharapkan dapat menjadi alat bantu efektif guna memberikan pemahaman lebih lanjut masalah pemilu dan calon yang akan maju. Terutama untuk penyandang netra, rungu dan wicara ” (wawancara Komisioner KPU Indah Sri Wulandari S.E M.Sc tanggal 8 Maret 2016)

Meskipun demikian penggunaan maupun sarana sosialisasi ini masih kurang efektif. Beberapa penyandang disabilitas menginginkan bahwa sarana tersebut dapat dimiliki oleh setiap individu agar dapat dipahami lebih lanjut. Dalam mengeluarkan kebijakan termasuk dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel khususnya bagi penyandang disabilitas harus berdasarkan aturan yang ada. Namun, dalam melangkah untuk memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas KPU Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu gamang, karena payung hukum yang ada tidak memberikan kewenangan demikian kepada KPU Kabupaten. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ada yang tumpang tindih. Jadi, hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel adalah lebih ke regulasi.

Grafik 3.3

Jawaban Responden Tentang Pemahaman Calon Kepala Daerah



Pertanyaan : seberapa paham anda tentang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pilkada lalu??

d. Ketelibatan kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Salah satu fase penting dalam pemilu adalah kegiatan kampanye. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan masyarakat akan masing-masing kandidat Kepala Daerah yang akan memperubutkan jabatan politis di suatu wilayah Melalui kegiatan inilah kemudian dapat diketahui visi misi maupun program yang akan ditawarkan oleh para kandidat. Untuk mengetahui apakah pemilihpenyandang disabilitas mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dai tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Distribusi Jawaban Responden Tentang Keteliban kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak mengikuti	58	61
2	Kadang-kadang mengikuti	24	36
3	Mengikuti	10	11
4	Selalu mengikuti	2	2
	Jumlah	94	100%

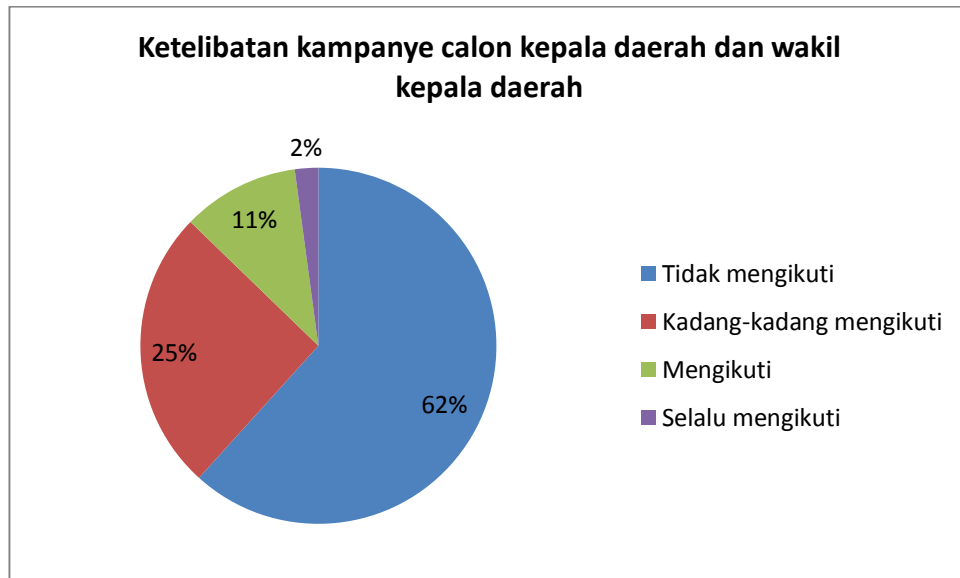
Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan kampanye masih sangatlah minim. Aksesibilitas dan juga keterbatasan fisik menjadi faktor utama pengahambat penyandang disabilitas untuk turut serta melakukan kampanye terhadap calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah.

Hampir 60 persen lebih responden menyatakan dirinya tidak mengikuti kegiatan kampanye dari masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada 2015 lalu. 36 persen responden atau sekitar 34 orang menjawab terkadang mengikuti kampanye. 11 persen responden menjawab mengikuti dan 2 persen responden menjawab selalu mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada 2015 lalu.

Grafik 3.4

Jawaban Responden Tentang Keteliban kampanye



Pertanyaan : apakah anda terlibat dalam kegiatan kampanye pasanan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada lalu?

2. Partisipasi Politik Saat Pemilihan

a. Memberikan hak suara dalam Pemilukada

Salah satu indikator partisipasi politik yang ada dalam pemilu adalah pemberian hak suara. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilu dapat ditegakkan. Tidak terkecuali penyandang disabilitas yang secara fisik memiliki kelainan dengan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu harus dipenuhi agar mampu

bertindak secara mandiri. Untuk mengetahui partisipasi penyandang disabilitas dalam memberikan suara pada Pilkada Sleman tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemberian Hak Suara

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak memberikan suara	30	32
2	Ya, saya memberikan suara	64	68
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari penyandang disabilitas menyatakan memberikan hak suaranya pada Pilkada Sleman 2015 lalu. Sekitar 64 responden atau sekitar 68 % memberikan hak suaranya. Akan tetapi sebanyak 32 % responden atau 30 orang menyatakan dirinya tidak memebrikan hak suaranya pada Pilkada Sleman. Meskipun mayoritas telah memberikan suara dalam Pilkada tersebut namun angka golput cukup besar di kalangan penyandang disabilitas.

Secara umum hambatan yang berarti bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya adalah faktor teknis dikarenakan keterbatasan fisik yang memaksa mereka tidak dapat melakukan aktivitas ketika tidak ada yang mendampingi. Penyandang disabilitas daksa ataupun pengguna kursi roda yang memiliki kesulitan dalam mengakses TPS jika terdapat TPS yang tidak aksesibel.

”saya tidak nyoblos kemarin pemilu, rumah saya jauh dengan tempat nyoblos. Tidak ada yang mengantar” (wawancara Yanto penyandang disabilitas ganda tanggal 16 Maret 2016)

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu memuat ketentuan bahwa TPS harus memberikankemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel diantaranya adalah Pertama, TPS tidak didirikan di lahan yang sekiranya mempersulit gerak penyandang disabilitas. Kedua, tinggi meja bilik setidaknya sekitar 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding pembatas TPS. Ketiga tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai. Keempat, tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur. Dan yang terakhir peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa agar penyandang disabilitas dapat leluasa bergerak di TPS.

Terdapat penyandang disabilitas daksa yang memiliki hambatan dalam melakukan mobilitas sehingga harus didatangi oleh petugas pemungutan suara. Akan tetapi kerahasiaan yang menjadi hak pemilih dalam pemungutan suara terabaikan karena disaksikan langsung oleh petugas pemungutan suara tersebut tanpa ada privasi dalam melakukan pencoblosan.

Lain halnya dengan penyandang disabilitas netra menemui kesulitan yang cukup berarti ketika pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang bersangkutan mengingat terganggunya penglihatan. Penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, tidak memiliki kesulitan yang berarti karena telah adapendamping yang membantunya, baik dari pihak keluarga maupun dari petugas TPS. Pemilih penyandang disabilitas bisa menentukan sendiri pendamping

yang akan mendampingi selama proses pencoblosan. Pendamping pemilih harus mengisi formulir C3 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013.

Untuk menjamin terpenuhinya hak suara penyandang netra pihak KPU mengupayakan template braille tersebar di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sleman yang berjumlah 1969 TPS. Walaupun *template* surat suara didistribusikan merata di setiap TPS, namun beberapa penyandang disabilitas netra tidak menerimanya. Sesuai dengan keterangan yang diberikan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sleman banyak dari petugas mengaku tidak mengetahui fungsi dari *template* yang telah didistribusikan. Hal ini menjadi fakta bahwasanya pelatihan yang dilaksanakan KPU terhadap petugas di lapangan masih kurang optimal.

Para penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam menggunakan hak pilihnya. Hanya saja mereka membutuhkan isyarat atau colekan dari petugas ketika sudah waktunya memasuki bilik suara. Demikian pula dengan penyandang disabilitas grahita ringan yang tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam melakukan pemungutan suara.

Grafik 3.5
Jawaban Responden Tentang Pemberian Hak Suara



Pertanyaan : apakah anda menggunakan hak suara pada Pilkada 2015 lalu?

b. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam Pemilukada

Kesadaran diri pemilih dalam memberikan hak suaranya dapat menjadi patokan ataupun ukuran tingkat partisipasi politik seseorang. Kesadaran tersebut dapat dibagi menjadi kesadaran pribadi ataupun kesadaran yang dimobilisir oleh faktor-faktor eksternal. Kesadaran diri dalam memberikan hak pilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2015 Kabupaten Sleman dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kesadaran Untuk Berpartisipasi Dalam
Pemilukada

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Sadar Diri	21	22
2	Cukup Sadar Diri	22	23
3	Sadar Diri	36	38
4	Sangat Sadar Diri	15	16
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar reponden memiliki kesadaran diri untuk turut serta dalam Pilkada Sleman 2015. Akan tetapi sebesar 22 % responden menyatakan dirinya tidak mempunyai kesadaran sendiri. Diikuti 23% yang menyatakan cukup sadar diri. Hanya sekitar 51% dari total responden yang menyatakan dirinya berpartisipasi dalam Pilkada 2015 dengan kesadaran sendiri.

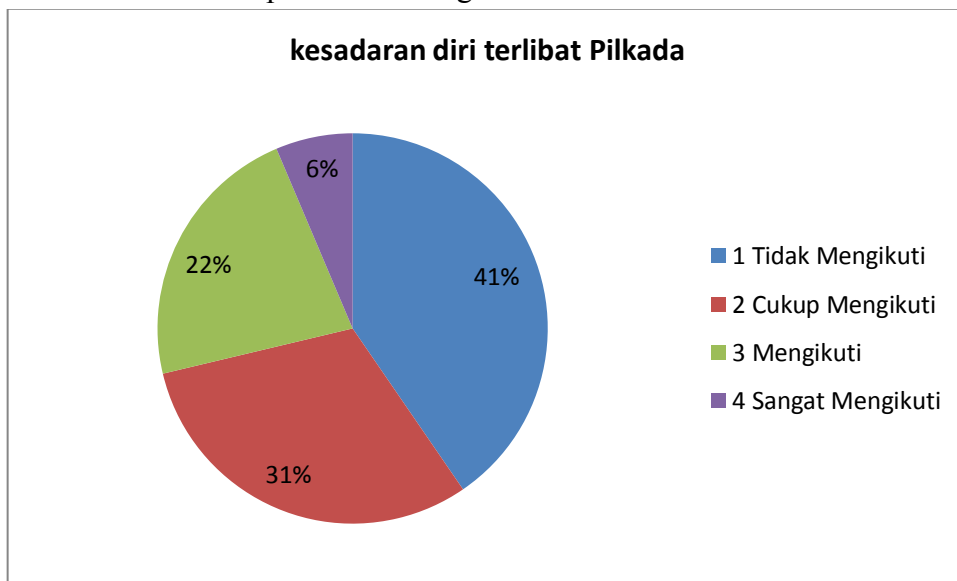
Sebagian besar dari mereka turut serta dalam pemilihan umum atas ajakan dari teman maupun keluarga. Hal ini wajar dikarenakan sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh penyandang disabilitas memerlukan pendamping terutama dari keluarganya sendiri. Penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilu karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang mampu memahami penyandang disabilitas dengan memenuhi hak-haknya.

Terdapat pemilih penyandang disabilitas yang orientasi memilih pada pemilu sebelumnya adalah uang, namun pada Pilkada 2015 lalu dia mencoba untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun yang mengharuskannya memilih

salah satu kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berusaha untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.

Terdapat juga responden yang dimotivasi oleh agama dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagai umat Islam, akan memilih satu calon pemimpin terbaik diantara calon pemimpin yang baik. Namun demikian, masih banyak penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu bukan karena dorongan dari dirinya, yaitu adanya dorongan dari keluarga. Hal ini dikarenakan aktivitas mereka banyak tergantung pada keluarga karena kekurangan kemampuan melakukan aktivitas secara mandiri.

Grafik 3.6
Jawaban Responden Tentang Kesadaran Diri Dalam Pilkada



Pertanyaan : apakah anda memiliki kesadaran sendiri dalam berpartisipasi pada Pilkada 2015 lalu?

3. Partisipasi Politik Pasca Pemilihan

Partisipasi politik penyandang disabilitas pasca pemilihan dapat dilihat dari antusiasme mengikuti dan mengawal jalannya pemungutan suara dan juga keterlibatan dalam diskusi maupun organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

a. Mengetahui kegiatan penghitungan suara dalam Pilkada

Partisipasi politik penyandang disabilitas pasca pemilihan dapat dilihat dari antusiasme mengikuti dan mengawal jalannya pemungutan suara. Untuk mengetahui antusiasme penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan penghitungan suara dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kegiatan Penghitungan Suara Dalam
Pilkada

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mengikuti	38	40
2	Cukup Mengikuti	29	31
3	Mengikuti	21	22
4	Sangat Mengikuti	6	7
	Jumlah	94	100%

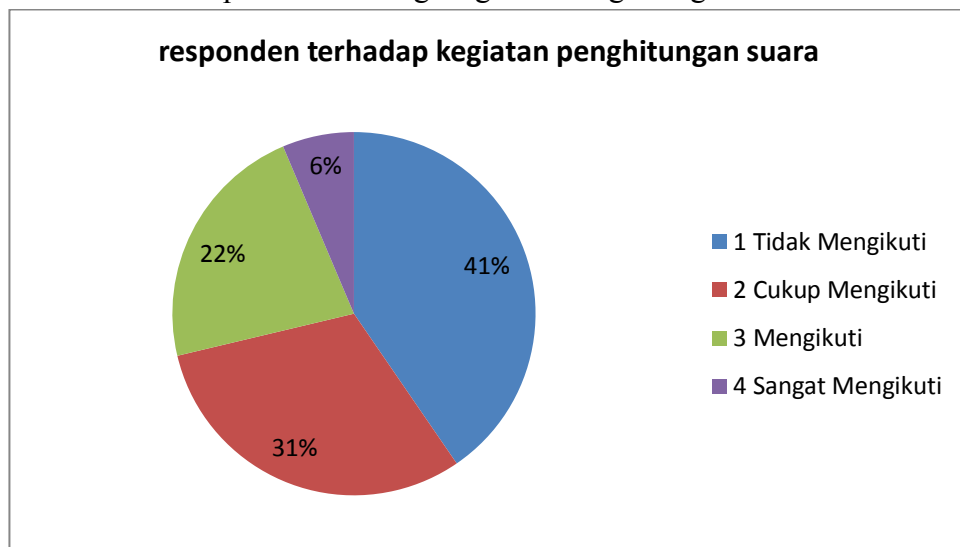
Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas dari responden menyatakan tidak mengikuti jalannya penghitungan suara. Hampir 40% responden atau sekitar 38 orang menyatakan tidak mengikuti penghitungan suara Pilkada 2015. 31 % responden menyatakan cukup mengikuti jalannya penghitungan suara. Dan hanya sekitar 29% responden yang menyatakan dirinya antusias dalam mengikuti jalannya penghitungan suara Pilkada Sleman 2015.

Mayoritas penyandang disabilitas menyatakan dirinya tidak mengikuti jalannya penghitungan suara karena mereka telah percaya terhadap pihak TPS (KPU). Rendahnya antusiasme ini dikarenakan minimnya informasi yang mereka terima dan juga media yang tidak aksesibel ataupun berprespektif disabilitas yang dapat digunakan penyandang disabilitas untuk mengakses setiap informasi terkait dengan penghitungan suara pada Pilkada 2015 lalu. Mereka merasa sudah menjalankan kewajibannya dengan hanya memberikan hak suaranya pada pemungutan suara.

“untuk penghitungan suara saya tidak ikut langsung ke tempat nyoblos (TPS). Yang penting saya sudah memberikan hak pilih saya dalam pemilu” (wawancara dengan Sayuti penyandang disabilitas netra tanggal 17 Maret 2016)

Grafik 3.7
Jawaban Responden Tentang Kegiatan Penghitungan Suara



Pertanyaan : apakah anda mengikuti kegiatan penghitungan suara pada Pilkada Sleman 2015 ?

b. Partisipasi dalam kegiatan politik maupun diskusi informal

Indikator selanjutnya untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas adalah melalui keikutsertaan dalam kegiatan politik seperti demonstrasi, diskusi, maupun *lobbying* terhadap pemerintah dalam lingkup mempengaruhi kebijakan publik. Untuk mengetahui partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Distribusi Jawaban Responden Tentang Kegiatan Politik Dan Diskusi Informal

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mengikuti	38	41
2	Cukup Mengikuti	35	37
3	Mengikuti	16	17
4	Sangat Mengikuti	5	5
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya mayoritas penyandang disabilitas atau sekitar 38 responden atau 41 % responden menyatakan dirinya tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik. Diikuti sejumlah 35 responden atau 37 % total responden yang menyatakan dirinya terkadang mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah 16 responden menyatakan mengikuti kegiatan politik maupun diskusi formal. Dan sisanya sekitar 5 responden menyatakan selalu mengikuti kegiatan politik maupun diskusi formal khususnya terkait dengan Pilkada Kabupaten Sleman 2015.

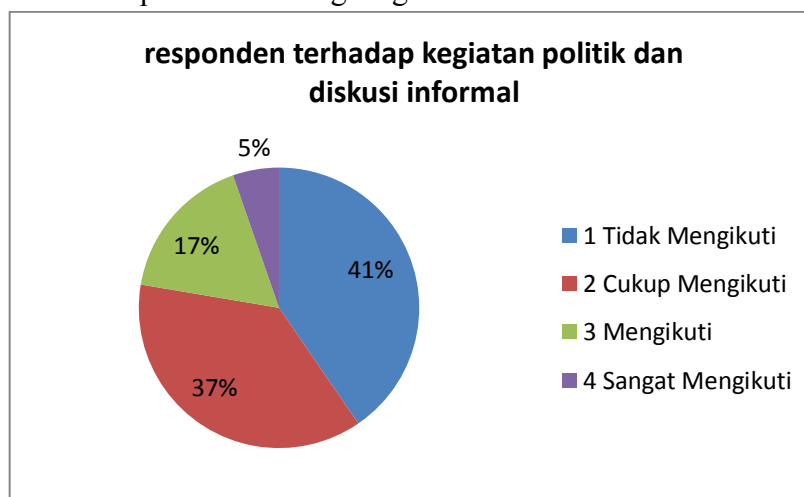
Adanya partisipasi dapat dilihat dari perjuangan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas netra (PERTUNI) melalui demonstrasi di depan KPU Kabupaten Sleman yang menuntut agar template (*braille*) pada Pemilu Legislatif 2014 dipenuhi sepenuhnya agar dapat mempermudah gerak mereka

ketika pelaksanaan pemungutan suara. Kegiatan serupa juga dilakukan beberapa organisasi difabel termasuk PPDI melalui audiensi dengan pihak KPU. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan dari pihak penyandang disabilitas khususnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2015.

“pada bulan Desember kita lakukan audiensi dengan pihak KPU bersama dengan organisasi difabel lain di wilayah sleman. Hal ini untuk menjembatani kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Sleman 2015. Bagaimanapun juga mereka merupakan warga negara yang haknya juga dijamin undang-undang. Kami ingin memastikan hak tersebut terpenuhi dan kami berharap Pilkada menjadi semakin aksesibel”(wawancara dengan pengurus PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Partisipasi lain juga ditunjukkan penyandang disabilitas dalam keikutsertaannya menjadi anggota relawan demokrasi. Dari total 22 relawan demokrasi yang bertugas untuk memberikan sosialisasi Pilkada Sleman 2015 6 (enam) diantaranya merupakan penyandang disabilitas

Grafik 3.8
Jawaban Responden Tentang Kegiatan Politik Dan Diskusi Informal



Pertanyaan : apakah anda sering mengikuti kegiatan politik atau diskusi?

4. Faktor Yang Mempengaruhi

Hak pilih warga negara dijamin oleh UUD 1945 maupun peraturan perundangan di bawahnya. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas

dalam menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak pilih bagi penyandang disabilitas. Namun secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas untuk memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Sleman 2015 yaitu informasi, lingkungan dan juga aksesibilitas

a. Informasi

Informasi menjadi salah satu faktor krusial yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih dalam hal ini penyandang disabilitas untuk memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sleman. Keterbatasan fisik membuat para penyandang disabilitas memerlukan metode lain guna mengakses informasi terkait Pilkada Sleman 2015 berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang secara mudah mendapatkan informasi terkait pilkada.

Sejumlah upaya dilakukan KPU untuk menjamin tersampainya informasi pemilu yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas dan memberikan informasi kepada pemilih tentang pemilu baik mengenai tata cara pemungutan suara maupun nama-nama calon sehingga akan mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Untuk mengetahui apakah informasi yang didapat oleh penyandang disabilitas tersebut sudah maksimal dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.12
Distribusi Jawaban Responden Tentang Informasi Yang Diterima

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Cukup	47	50
2	Sedikit Cukup	33	35
3	Cukup	9	10
4	Sangat Cukup	5	5
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwasanya informasi yang diterima oleh penyandang disabilitas terkait dengan Pilkada Sleman 2015 sangatlah minim. Sebanyak 50 % responden mengaku bahwa informasi yang dapat diterima terkait Pilkada tidaklah cukup. Diikuti 35 % dari responden yang menyatakan bahwasanya sedikit informasi yang dapat mereka terima. Sisanya sekitar 15 % responden merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan seputar Pilkada sudah cukup bahkan sangat cukup.

Fenomena ini terjadi karena memang sosialisasi yang dilakukan belumlah masif. Disisi lain tidak adanya media informasi yang khusus ditujukan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas turut menjadi faktor yang mempengaruhi tidak tersampainya informasi pilkada dengan baik. Hambatan yang muncul dari pihak KPU adalah kesulitan menyampaikan materisosialisasi kepada penyandang disabilitas, mengingat adanyakebutuhan khusus yang harus diperhatikan.

Untuk mempermudah transfer materisosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU mengadakan beberapaalat peraga pemilu dan meminta bantuan kepada pihak yang lebih bisamampu menyampaikan materi kepada penyandang

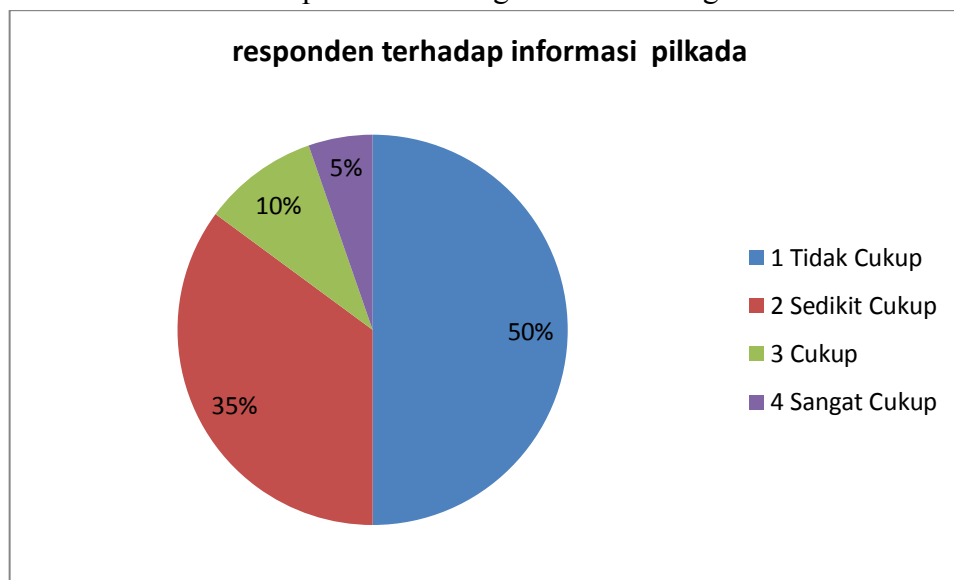
disabilitas, yaitu para guru Sekolah Luar Biasa (SLB). Metode penyampaian informasi dengan ceramah menimbulkan masalah tersendiri bagi penyandang disabilitas netra. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin.

Selain itu penyandang disabilitas lain mengeluhkan tidak diberikannya *template* maupun buku panduan yang dapat dipelajari lebih lanjut ketika sosialisasi sudah berakhir.

“Sosialisasi dilaksanakan dari organisasi, namun sosialisasi masih kurang. Kita tidak diberi tinggalan contoh surat suara maupun daftar nama caleg, sehingga kita belum tahu caleg yang akan dipilih” (wawancara Supriyatno penyandang disabilitas netra tanggal 17 Maret 2016)

Beberapa penyandang disabilitas terutama yang terlibat dalam penelitian ini, bahkan mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak pada kebingungan memilih calon ketika proses pencoblosan dibilik suara.

Grafik 3.9
Jawaban Responden Tentang Informasi Yang Diterima



Pertanyaan : apakah menurut anda informasi tentang pilkada sudah cukup diberikan?

b. Aksesibilitas

Faktor yang turut mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Sleman 2015 adalah aksesibilitas. Keterbatasan fisik menjadi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam beraktivitas. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan ataupun melakukan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

TPS sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di tempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan, dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai

dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Tabel 3.13
Distribusi Jawaban Responden Tentang Aksesibilitas Dalam Pilkada

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mudah	28	30
2	Cukup Mudah	33	35
3	Mudah	26	28
4	Sangat Mudah	7	7
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas responden menyatakan aksesibilitas pada Pilkada Sleman 2015 belum memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. 30 % responden atau 28 orang menyatakan tidak mudah. Diikuti 35 % responden atau sekitar 33 orang menjawab cukup mudah. Sekitar 28% responden berpendapat bahwa aksesibilitas pilkada sudah baik dan 7 % lainnya mengaku sudah sangat baik.

TPS yang aksesibel menjadi sarana penting bagi penyandang disabilitas untuk tetap memberikan hak suaranya dalam pemilu. Dari data dan keterangan yang peneliti peroleh dari narasumber terbukti bahwa pelaksanaan Pilkada Sleman 2015 masih belum sepenuhnya aksesibel. Seperti contoh banyak dari pengguna kursi roda atau tuna daksa yang harus membutuhkan bantuan untuk menaiki undakan atau tangga dengan mengangkat kursi roda yang digunakannya. Bantuan jugaberupa gendongan, yaitu menggendong penyandangdisabilitas sampai ke bilik suara karena tangga di TPSterlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan

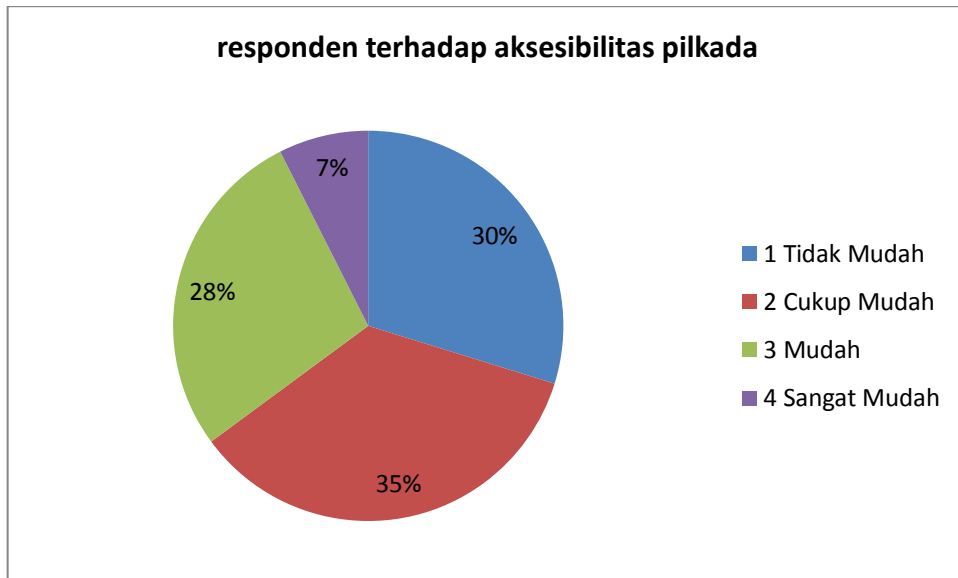
petugas untuk mengangkat kursi roda yang digunakan oleh penyandang disabilitas sampai di TPS.

Temuan PPDI juga relevan dengan kondisi ini bahwa masih terdapat TPS yang belum menempatkan kotak suara di bawah ketinggian 100cm, akibatnya penyandang disabilitas daksa tidak mampu memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya secara mandiri karena terlalu tinggi dan harus dibantu oleh petugas atau pendamping yang telah dipilihnya sendiri.

“kita kecewa kemarin bahwa petugas TPS banyak yang belum mengerti tentang prosedur penyiapan TPS yang aksesibel. Kami menemukan beberapa TPS yang kotak suaranya tingginya lebih dari 100 cm. ini sangat mempersulit pengguna kursi roda untuk bergerak secara mandiri” (wawancara PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Penyediaan TPS yang belum aksesibel tentu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013. Dalam Pasal 17 ayat (2) memuat ketentuan bahwa TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Grafik 3.10
Jawaban Responden Tentang Aksesibilitas Dalam Pilkada



Pertanyaan : bagaimana kemudahan dan fasilitas yang diberikan penyelenggara saat pilkada ?

c. Lingkungan

Faktor lingkungan atau dalam hal ini keluarga turut andil dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sleman 2015. Banyak keluarga yang secara psikologis menganggap bahwa anggota keluarga yang mempunyai hambatan disabilitas adalah orang-orang yang terpinggirkan. Hal inilah yang kerap kali menjadi penghalang bagi para penyandang disabilitas untuk turut serta memberikan hak suara pada pemilih. Untuk mengetahui apakah faktor lingkungan berpengaruh pada partisipasi penyandang disabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.14
Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Lingkungan

No	Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Mendukung	23	24
2	Cukup Mendukung	31	35
3	Mendukung	30	40
4	Sangat Mendukung	10	11
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 24 % dari responden menyatakan bahwa lingkungan tidak mendukung dalam Pilkada Sleman 2015 lalu. Selanjutnya sekitar 35% responden atau sekitar 33 orang menjawab keluarga maupun lingkungan cukup mendukung dirinya terlibat dalam pilkada. 40% dari responden menjawab bahwa keluarga mendukung dalam pilkada dan sisanya sekitar 11 % dari responden menyatakan bahwa lingkungan atau keluarga sangat mendukung dalam Pilkada Sleman 2015.

Keluarga mempunyai posisi penting dalam mengedukasi dan mendukung penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini dikarenakan kedekatan personal keluarga dan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas. Selain itu teman maupun tetangga juga mempunyai andil dalam memberikan stimulus positif bagi para penyandang disabilitas untuk mengerti hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

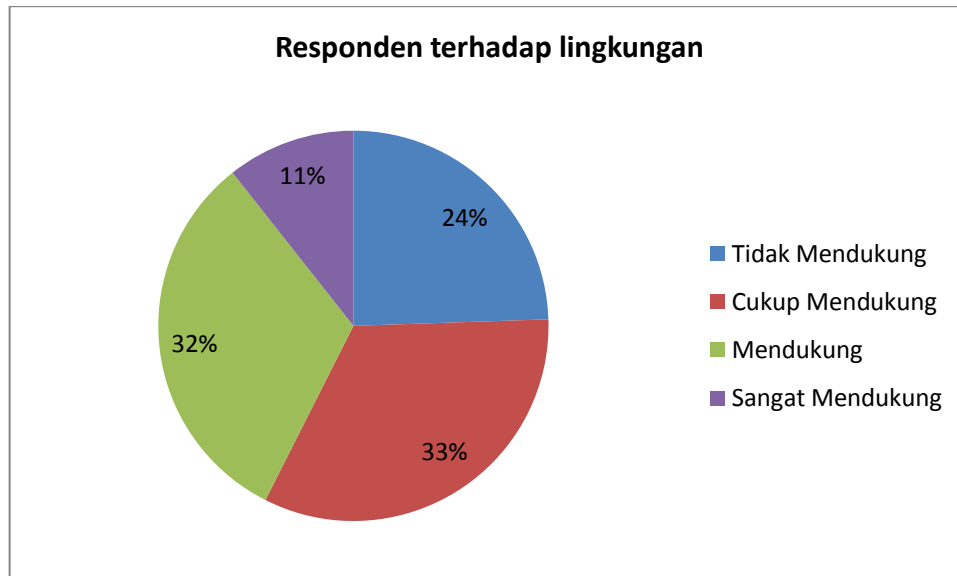
Meskipun mayoritas responden menyatakan keluarga mendukung dalam Pilkada sleman 2015 namun tidak sedikit dari responden yang menyatakan ada hambatan yang menjadi penghalang dirinya memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2015 Sleman. Terdapat penyandang disabilitas yang harus terpaksa

kehilangan hak pilihnya dikarenakan tidak ada keluarga yang mengantar sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan temuan lapangan dan juga keterangan yang diperoleh dari PPDI bahwasanya ada beberapa keluarga yang memang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan bagi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas karena alasan psikologis atau aib bagi keluarga tersebut, terutama dengan penyandang disabilitas grahita yang memiliki gangguan jiwa.

“ada beberapa teman kita penyandang disabilitas yang terpaksa tidak mengikuti pemilihan karena keluarganya tidak mengajaknya. Entah karena malu atau apa saya tidak tahu” (wawancara dengan pengurus PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Keterbatasan fisik bukanlah menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu saja berlawanan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia.

Grafik 3.11
Jawaban Responden Tentang Lingkungan Dalam Pilkada



Pertanyaan : apakah lingkungan/keluarga mendukung dan membantu anda dalam pilkada?

C. Analisa Tabulasi Silang

Dalam penelitian ini selain melihat dari masing-masing indikator, juga dilihat dari hasil analisa tabulasi antara identitas responden dengan masing-masing indikator partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015.

1. Jenis Kelamin

a. Pra Pemilihan

1) Analisis Jenis Kelamin dengan Sosialisasi Pilkada

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisa silang antara jenis kelamin dengan partisipasi dalam mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Sleman. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.15
Analisa Silang antara Jenis Kelamin dengan Sosialisasi Pilkada
sex * p1 Crosstabulation

			p1				Total
			tidak mengikuti	kadang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
sex	laki-laki	Count	13	17	19	6	55
		% within sex	23.6%	30.9%	34.5%	10.9%	100.0%
		% within p1	41.9%	51.5%	82.6%	85.7%	58.5%
		% of Total	13.8%	18.1%	20.2%	6.4%	58.5%
	perempuan	Count	18	16	4	1	39
		% within sex	46.2%	41.0%	10.3%	2.6%	100.0%
		% within p1	58.1%	48.5%	17.4%	14.3%	41.5%
		% of Total	19.1%	17.0%	4.3%	1.1%	41.5%
Total		Count	31	33	23	7	94
		% within sex	33.0%	35.1%	24.5%	7.4%	100.0%
		% within p1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	33.0%	35.1%	24.5%	7.4%	100.0%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 13 orang atau sekitar 13,8% responden menjawab tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sleman. Diikuti sejumlah 17 responden yang menjawab terkadang mengikuti sosialisasi atau sekitar 18,1% dari total responden. Selanjutnya 19 orang atau 20,2% responden

laki-laki menyatakan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Sleman. Dan sisanya sekitar 6 orang menyatakan dirinya selalu mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Sleman.

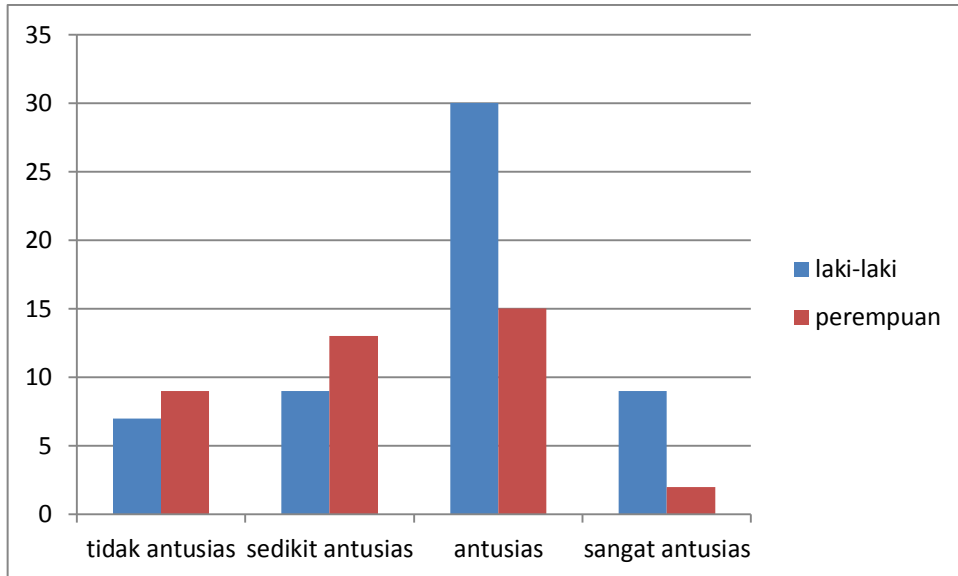
Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang menjawab tidak mengikuti kegiatan sosialisasi KPU Sleman. Diikuti 16 orang atau sekitar 17 % dari total responden menjawab terkadang mengikuti sosialisasi. Selanjutnya 4 orang responden dengan jenis kelamin perempuan menjawab mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Dan sisanya 1 orang responden menyatakan dirinya selalu mengikuti kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU Sleman.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa presentase partisipasi politik yang dilakukan dalam hal ini mengikuti sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU cenderung lebih diperhatikan oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan responden dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan ketertarikan akan politik kaum laki-laki lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Hal ini wajar terjadi di kalangan disabilitas Sleman karena mereka terbiasa bersosialisasi secara komunal melalui organisasi-organisasi yang menaungi kaum disabilitas di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait sosialisasi Pilkada Sleman 2015.

Grafik. 3.12

Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Sosialisasi Pilkada



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

2) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Antusiasme dalam Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan antusiasme ataupun motivasi diri terlibat dalam Pilkada. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.16
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Antusiasme dalam Pilkada

sex * p2 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 2				Total
			tidak antusias	sedikit antusias	antusias	sangat antusias	
sex	laki-laki	Count	7	9	30	9	55
		% within sex	12.7%	16.4%	54.5%	16.4%	100.0%
		% within p2	43.8%	40.9%	66.7%	81.8%	58.5%
		% of Total	7.4%	9.6%	31.9%	9.6%	58.5%
	perempuan	Count	9	13	15	2	39
		% within sex	23.1%	33.3%	38.5%	5.1%	100.0%
		% within p2	56.3%	59.1%	33.3%	18.2%	41.5%
		% of Total	9.6%	13.8%	16.0%	2.1%	41.5%
Total		Count	16	22	45	11	94
		% within sex	17.0%	23.4%	47.9%	11.7%	100.0%
		% within p2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	17.0%	23.4%	47.9%	11.7%	100.0%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

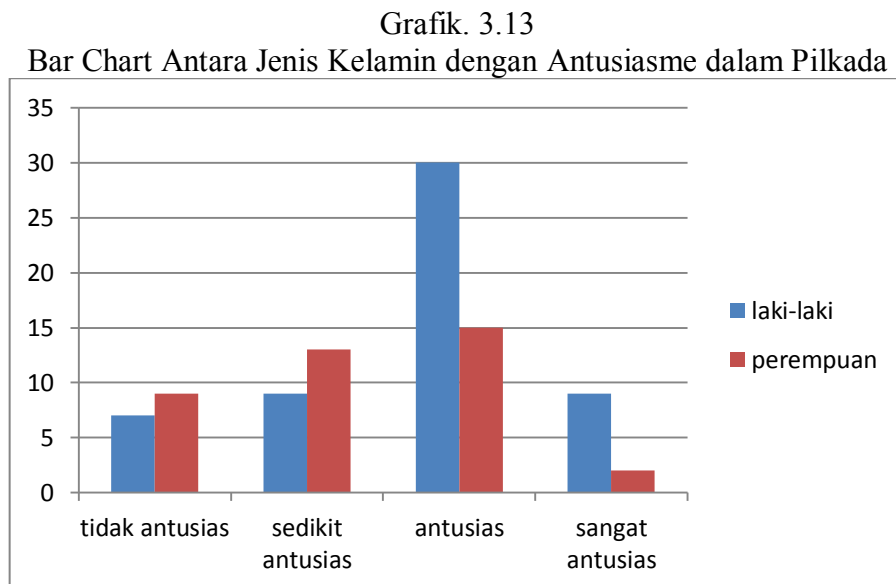
Berdasarkan tabel hasil persilangan antar jenis kelamin dengan antusiasme penyandang disabilitas dalam mengikuti Pilkada Sleman 2015 dapat diinterpretasikan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 7,4% responden menjawab tidak antusias terlibat dalam pilkada. Diikuti sejumlah 9 orang atau sekitar 9,6% responden menyatakan dirinya sedikit antusias. 30 orang atau sekitar 31,9% dari total responden menjawab antusias dalam mengikuti Pilkada. Dan sisanya sejumlah 9 orang responden menjawab sangat antusias dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Sleman 2015.

Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang atau sekitar 9,6 % dari total responden menjawab tidak antusias. Diikuti dengan 13,8 % responden atau sekitar 13 responden menjawab sedikit antusias. Sejumlah 15 orang atau 16%

responden dengan jenis kelamin perempuan menjawab antusias. Dan sisanya sekitar 2 orang menjawab sangat antusias dalam mengikuti Pemilihan kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Sleman 2015.

Secara umum antusiasme masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Sleman cukup baik. Hal ini didorong oleh keinginan mereka memperoleh hak dan kesetaraan sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan sama di mata hukum. Mereka menilai bahwa keterbatasan mereka bukan halangan mereka untuk turut serta memilih pemimpin yang nantinya dapat memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait antusiasme keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

3) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Pemahaman Calon

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antar jenis kelamin dengan pemahaman calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.17
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Pemahaman Calon

sex * p3 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 3				Total
			tidak tahu	sedikit tahu	tahu	sangat tahu	
sex	laki-laki	Count	11	15	22	7	55
		% within sex	20.0%	27.3%	40.0%	12.7%	100.0%
		% within p3	42.3%	45.5%	81.5%	87.5%	58.5%
		% of Total	11.7%	16.0%	23.4%	7.4%	58.5%
	perempuan	Count	15	18	5	1	39
		% within sex	38.5%	46.2%	12.8%	2.6%	100.0%
		% within p3	57.7%	54.5%	18.5%	12.5%	41.5%
		% of Total	16.0%	19.1%	5.3%	1.1%	41.5%
Total	Count	26	33	27	8	94	
	% within sex	27.7%	35.1%	28.7%	8.5%	100.0%	
	% within p3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	27.7%	35.1%	28.7%	8.5%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 11 orang atau sekitar 11,7 % responden menjawab tidak tahu terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada 2015. Diikuti sebanyak 15 orang atau sekitar 16 % menjawab sedikit tahu. Responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 22 orang atau sekitar 23,4 % responden mengaku mengetahui calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada 2015. Dan sisanya sekitar 7 orang atau 7,4 %

responden menjawab sangat mengetahui masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pada Pilkada 2015.

Responden perempuan menjawab tidak tahu atau tidak memahami Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjumlah 15 orang atau sekitar 16% responden. Kemudian sejumlah 18 orang atau 19,1% responden menjawab sedikit memahami. Diikuti sejumlah 5 orang atau sekitar 5,3% dari total responden yang menjawab tahu akan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pilkada 2015. Dan sisanya 1 orang atau 1,1% responden menyatakan dirinya sangat mengetahui calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Sleman 2015.

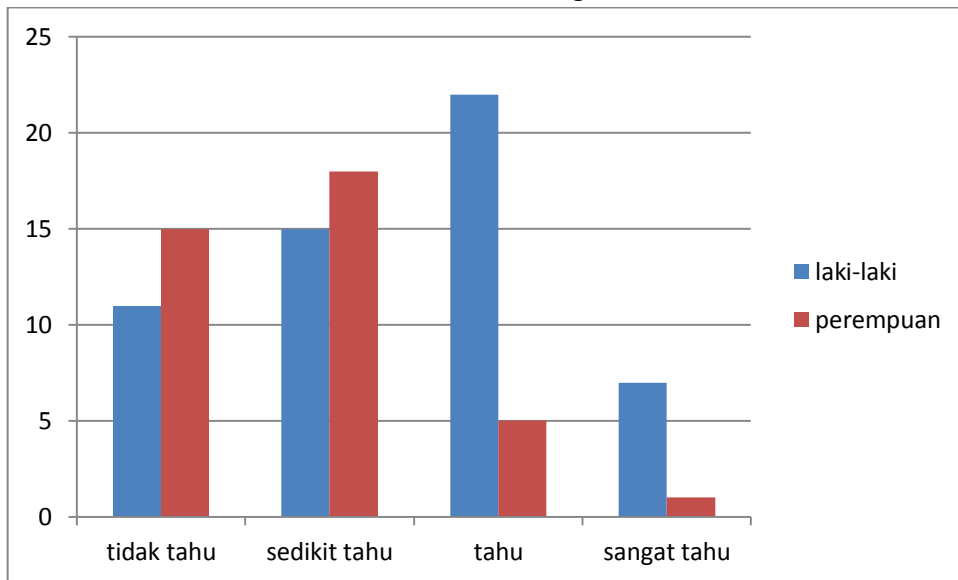
Secara umum responden berjenis kelamin laki-laki memiliki ketertarikan terhadap politik yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal itu relevan dengan data diatas yang menunjukkan pemahaman akan Pilkada lebih tinggi responden laki-laki dibanding perempuan, termasuk didalamnya pemahaman akan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diskusi ataupun obrolan secara komunal dalam lingkup organisasi juga turut mempengaruhi pemahaman masyarakat penyandang disabilitas terhadap Pilkada Sleman 2015.

“ saya tahu yang maju sekarang ini pak Purnomo bupatinya sekarang, sama wakilnya juga. Mereka nyalon lagi mas”(wawancara Sarwanto penyandang daksa tanggal 14 Maret 2015)

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait pemahaman masyarakat penyandang

disabilitas Sleman terhadap Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.14
Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Pemahaman Calon



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

4) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan kampanye

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisa silang antara jenis kelamin dengan partisipasi dalam mengikuti kegiatan kampanye masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.18
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan kampanye

sex * p4 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 4				Total
			tidak mengikuti	kadang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
sex	laki-laki	Count	25	20	8	2	55
		% within sex	45.5%	36.4%	14.5%	3.6%	100.0%
		% within p4	43.1%	83.3%	80.0%	100.0%	58.5%
		% of Total	26.6%	21.3%	8.5%	2.1%	58.5%
	perempuan	Count	33	4	2	0	39
		% within sex	84.6%	10.3%	5.1%	.0%	100.0%
		% within p4	56.9%	16.7%	20.0%	.0%	41.5%
		% of Total	35.1%	4.3%	2.1%	.0%	41.5%
Total	Count	58	24	10	2	94	
	% within sex	61.7%	25.5%	10.6%	2.1%	100.0%	
	% within p4	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	61.7%	25.5%	10.6%	2.1%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sejumlah 26,6 % responden dengan jenis kelamin laki-laki menyatakan tidak mengikuti kegiatan kampanye pada Pilkada 2015 Kabupaten Sleman. Diikuti selanjutnya sekitar 21,3 % responden atau 20 orang menjawab bahwa mereka terkadang mengikuti kegiatan Kampanye. Sejumlah 8,5% responden atau sekitar 8 orang menjawab mengikuti kegiatan kampanye Pilkada. Dan sisanya 2,1% responden dengan jenis kelamin laki-laki menjawab selalu mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Daerah pada Pilkada sleman 2015.

Responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 33 orang mengaku tidak mengikuti kegiatan kampanye pada Pilkada sleman 2015. Selanjutnya diikuti sejumlah 4,3 % responden menjawab terkadang mengikuti kegiatan tersebut. Hanya sekitar 2,1% dari total responden dengan jenis kelamin

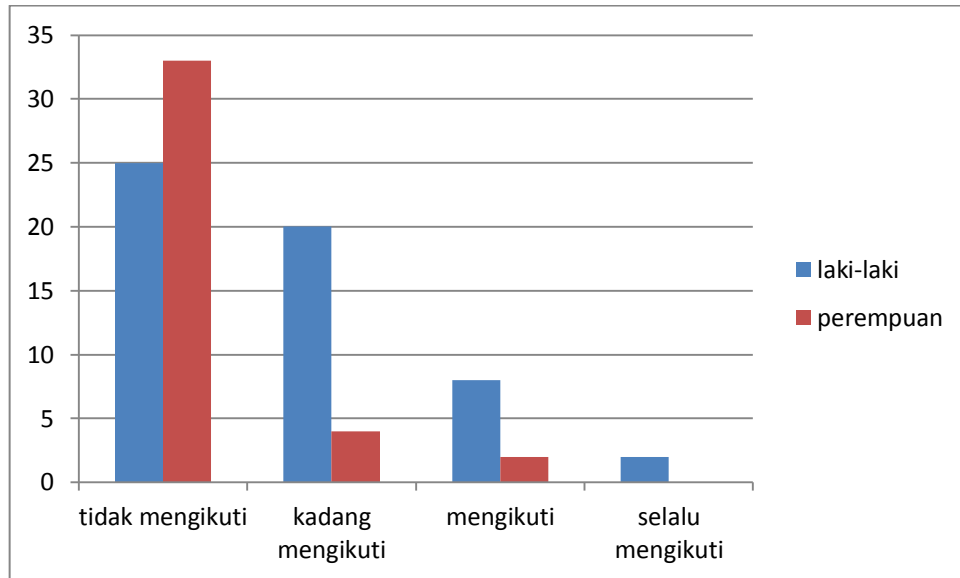
perempuan yang menjawab mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Calon kepala Daerah dalam pilkada Sleman 2015.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat penyandang disabilitas tidak mengikuti kegiatan kampanye sebagai bentuk orientasi masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada Sleman 2015. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fisik yang menjadi penghalang dalam mobilitas masyarakat penyandang disabilitas untuk turut serta melakukan kegiatan kampanye pada Pilkada Sleman 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas Sleman terhadap kegiatan kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.15

Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Kampanye



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

b. Pemilihan

5) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Pemberian Hak Suara

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan pemberian hak suara pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.19
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Pemberian Hak Suara

sex * p5 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 5		Total
			tidak memberikan suara	memberikan suara	
sex	laki-laki	Count	12	43	55
		% within sex	21.8%	78.2%	100.0%
		% within p5	40.0%	67.2%	58.5%
		% of Total	12.8%	45.7%	58.5%
	perempuan	Count	18	21	39
		% within sex	46.2%	53.8%	100.0%
		% within p5	60.0%	32.8%	41.5%
		% of Total	19.1%	22.3%	41.5%
Total		Count	30	64	94
		% within sex	31.9%	68.1%	100.0%
		% within p5	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	31.9%	68.1%	100.0%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 12, 8% atau sekitar 12 orang menjawab tidak memberikan hak suara pada pilkada Sleman 2015. Hanya sekitar 43 orang atau 45,7 % responden menjawab memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Responden dengan jenis kelamin perempuan sekitar 18 orang atau 19,1 % dari total responden menyatakan tidak memberikan hak suaranya pada Pilkada Sleman 2015. Sejumlah 21 orang atau 22,3 % responden dengan jenis kelamin perempuan menjawab memberikan hak suaranya pada Pilkada Sleman 2015.

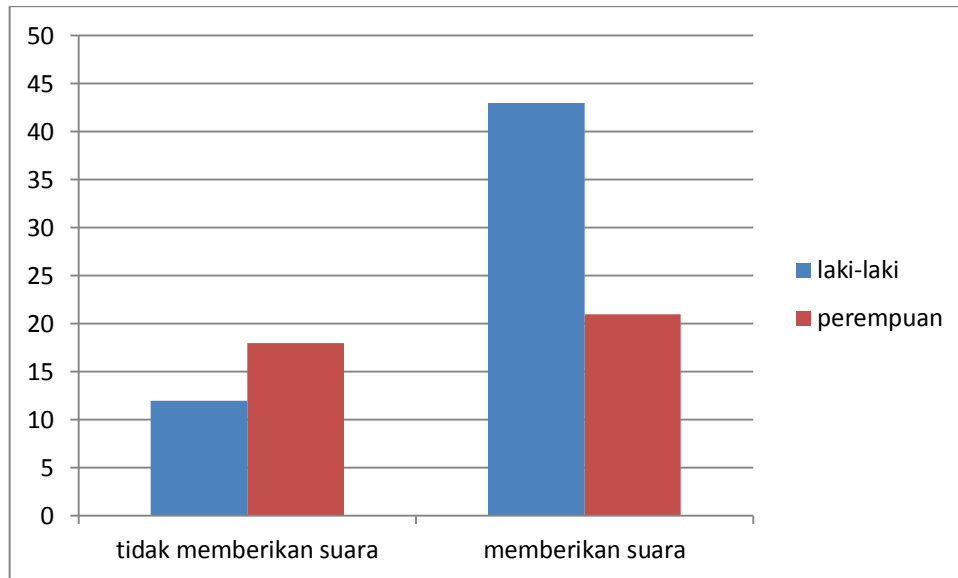
Meskipun mayoritas masyarakat penyandang disabilitas memberikan hak suaranya dalam Pilkada Sleman 2015, namun angka golput masih cukup tinggi yaitu sekitar 31,9%. Faktor yang menjadi penghambat masyarakat penyandang

disabilitas secara umum terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Pendataan masyarakat disabilitas yang masuk dalam DPT belumlah maksimal. Hal ini menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas yang sudah mempunyai hak pilih terabaikan haknya dalam Pilkada Sleman 2015. Kendala lain seperti aksesibilitas juga turut menjadi penghambat masyarakat penyandang disabilitas untuk memberikan hak suaranya secara mandiri dalam Pilkada Sleman 2015. Berdasarkan paparan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwasan politik penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dengan prosedur, fasilitas dan bahan-bahan pemilihan yang bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan belum dapat dipenuhi secara optimal.

”saya tidak nyoblos kemarin pemilu, rumah saya jauh dengan tempat nyoblos. Tidak ada yang mengantar” (wawancara Yanto penyandang disabilitas ganda tanggal 16 Maret 2016)

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait pemberian hak suara penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.16
Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Pemberian Hak Suara



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

6) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kesadaran Mengikuti Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan kesadaran mengikuti Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.20
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kesadaran Mengikuti Pilkada

sex * p6 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 6				Total
			tidak sadar diri	kurang sadar diri	sadar diri	sangat sadar diri	
sex	laki-laki	Count	10	8	24	13	55
		% within sex	18.2%	14.5%	43.6%	23.6%	100.0%
		% within p6	47.6%	36.4%	66.7%	86.7%	58.5%
		% of Total	10.6%	8.5%	25.5%	13.8%	58.5%
	perempuan	Count	11	14	12	2	39
		% within sex	28.2%	35.9%	30.8%	5.1%	100.0%
		% within p6	52.4%	63.6%	33.3%	13.3%	41.5%
		% of Total	11.7%	14.9%	12.8%	2.1%	41.5%
Total	Count	21	22	36	15	94	
	% within sex	22.3%	23.4%	38.3%	16.0%	100.0%	
	% within p6	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	22.3%	23.4%	38.3%	16.0%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 10, 6 % atau sekitar 10 orang menjawab tidak mempunyai kesadaran sendiri dalam mengikuti kegiatan Pilkada Sleman 2015. Diikuti sejumlah 8,5% responden menjawab kurang memiliki kesadaran diri dalam mengikuti Pilkada. Sejumlah 22,5% responden menjawab memiliki kesadaan sendiri mengikuti pilkada. Dan sisanya sekitar 13, 8% responden dengan jenis kelamin laki-laki menjawab sangat memiliki kesadaran sendiri dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sleman 2015.

Responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 11,7% atau sekitar 11 orang menjawab tidak memiliki kesadaran sendiri dalam mengikuti Pilkada. Selanjutnya sekitar 14, 9% responden menjawab atau sekitar 14 orang menjawab kurang memiliki kesadaran sendiri dalam mengikuti Pilkada. Hanya sekitar 12,

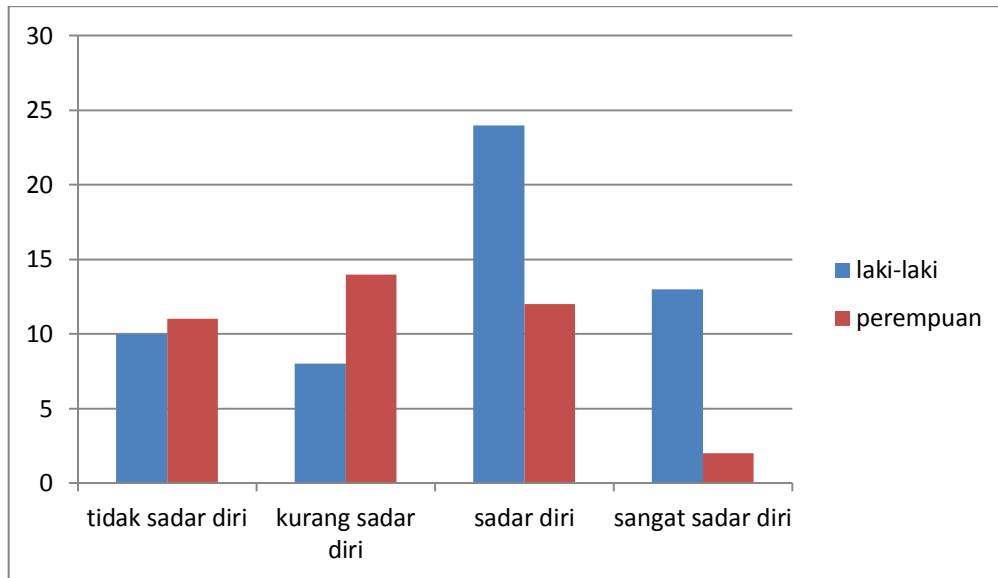
8% responden menjawab memiliki kesadaran sendiri dalam mengikuti Pilkada . dan sisasnya sekitar 2,1 % responden menjawab sangat memiliki kesadaran sendiri dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sleman 2015.

Tingkat kesadaran masyarakat penyandang disabilitas dalam Pilkada Sleman 2015 tergolong rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang turut membuat kesadaran diri penyandang disabilitas terhambat seperti aksesibilitas yang menghambat mobilitas atau ruang gerak penyandang disabilitas. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat penyandang disabilitas yang alasan mengikuti Pilkada adalah karena uang namun kemudian termotivasi untuk menjadi pemilih yang cerdas, agar dapat memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait kesadaran diri penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.17

Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Kesadaran Diri



Sumber : data primer yang diolah (2016)

c. Pasca Pemilihan

7) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Penghitungan Suara

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan kegiatan penghitungan suara pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.21
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Penghitungan Suara

sex * p7 Crosstabulation

			p7				Total
			tidak mengikuti	kurang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
sex	laki-laki	Count	16	17	17	5	55
		% within sex	29.1%	30.9%	30.9%	9.1%	100.0%
		% within p7	42.1%	58.6%	81.0%	83.3%	58.5%
		% of Total	17.0%	18.1%	18.1%	5.3%	58.5%
	perempuan	Count	22	12	4	1	39
		% within sex	56.4%	30.8%	10.3%	2.6%	100.0%
		% within p7	57.9%	41.4%	19.0%	16.7%	41.5%
		% of Total	23.4%	12.8%	4.3%	1.1%	41.5%
Total	Count	38	29	21	6	94	
	% within sex	40.4%	30.9%	22.3%	6.4%	100.0%	
	% within p7	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	40.4%	30.9%	22.3%	6.4%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel tersebut dapat diinterpretaasikan bahwa hasil analisa tabulasi silang antara variabel jenis kelamin dengan kegiatan penghitungan suara menunjukkan data bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 17 % menjawab tidak mengikuti perkembangan kegiatan penghitungan suara pasaca pemungutan suara. Diikuti selanjutnya sebesar 18,1% atau sekitar 17 orang yang menjawab terkadang mengikuti perkembangan penghitungan suara. Sejumlah 17 orang responden atau sekitar 18,1% menjawab mengikuti kegiatan penghitungan suara. Dan sisanya sekitar 5 orang atau 5,3 % responden menjawab selalu mengikuti penghitungan suara Pilkada Sleman 2015.

Responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 22 orang atau sekitar 23,4 % responden menjawab tidak mengikuti perkembangan penghitungan suara. Selanjutnya sejumlah 12 responden dengan jenis kelamin perempuan menjawab

kurang mengikuti perkembangan penghitungan suara. Selanjutnya sebanyak 4 orang atau 4,3% menjawab mengiuti kegiatan penghitungan suara. Dan hanya satu responden yang mwnyatakan dirinya selalu mengikuti kegiatan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Sleman 2015.

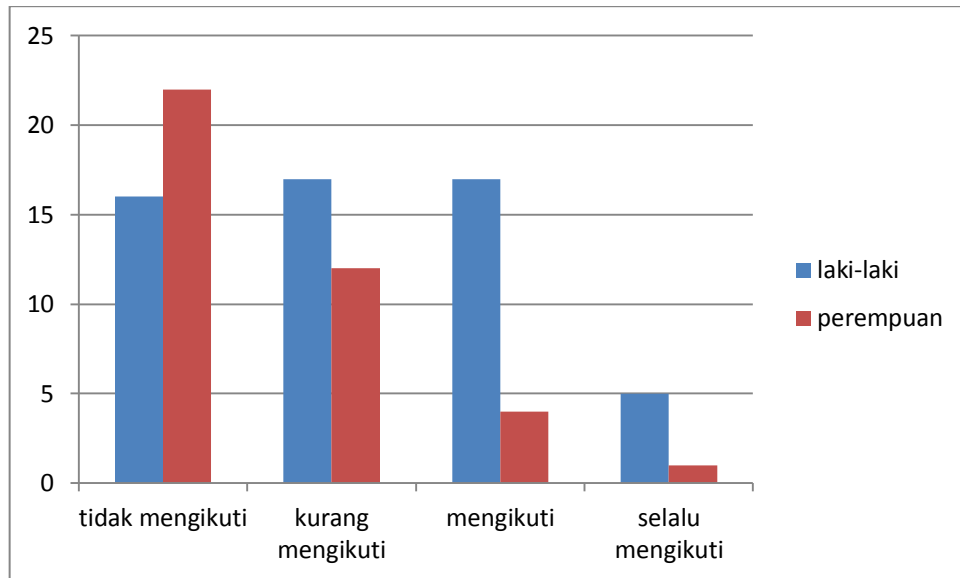
Dari data tersebut dapat diintrepretasikan bahwa sebagian masyarakat penyandang disabilitas di kabupaten Sleman mayoritas tidak mengikuti penghitungan suara Pilkada Sleman 2015. Mereka mempercayakan penghitungan suara kepada pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai otoritas legal yang mengurus masalah pemilu. Seperti salah satu responden penyandang disabilitas netra berikut.

“untuk penghitungan suara saya tidak ikut langsung ke tempat nyoblos (TPS). Yang penting saya sudah memberikan hak pilih saya dalam pemilu” (wawancara dengan Sayuti penyandang disabilitas netra tanggal 17 Maret 2016)

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait kegiatan penghitungan suara penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.18

Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Penghitungan Suara



Sumber : data primer yang diolah (2016)

8) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Politik Informal

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan kegiatan politik informal pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.22
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Politik Informal

sex * p8 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 8				Total
			tidak mengikuti	kurang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
sex	laki-laki	Count	16	20	15	4	55
		% within sex	29.1%	36.4%	27.3%	7.3%	100.0%
		% within p8	42.1%	57.1%	93.8%	80.0%	58.5%
		% of Total	17.0%	21.3%	16.0%	4.3%	58.5%
	perempuan	Count	22	15	1	1	39
		% within sex	56.4%	38.5%	2.6%	2.6%	100.0%
		% within p8	57.9%	42.9%	6.3%	20.0%	41.5%
		% of Total	23.4%	16.0%	1.1%	1.1%	41.5%
Total	Count	38	35	16	5	94	
	% within sex	40.4%	37.2%	17.0%	5.3%	100.0%	
	% within p8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	40.4%	37.2%	17.0%	5.3%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan presentase 17 % atau sekitar 16 orang menjawab tidak mengikuti kegiatan politik informal. Diikuti dengan jumlah responden sekitar 20 orang atau 21,3% menjawab kurang mengikuti. Sejumlah 15 orang atau 16 % responden menjawab mengikuti kegiatan politik informal. Dan sisanya sekitar 4,3 % menyatakan dirinya selalu mengikuti kegiatan politik informal pada Pilkada Sleman 2015.

Berbeda dengan responden laki-laki, responden berjenis kelamin perempuan cenderung memiliki ketertarikan atau aktivitas politik informal yang lebih rendah dibanding dengan responden laki-laki. Hal ini relevan dengan data yang menunjukkan bahwa sejumlah 23,4 % dari total responden dengan jenis kelamin perempuan menjawab tidak mengikuti kegiatan politik informal apapun.

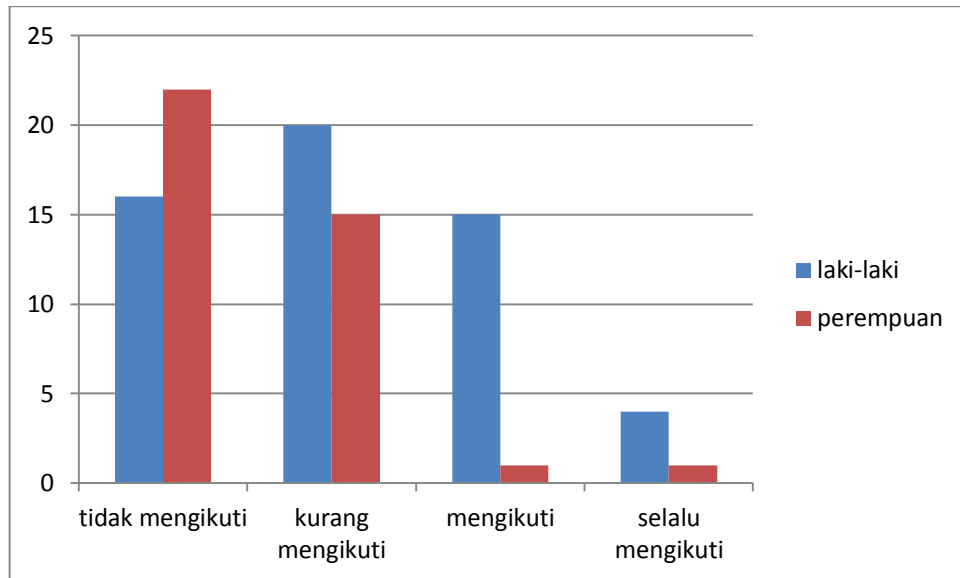
Diikuti sejumlah 16% responden yang menyatakan dirinya kurang mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah 1 responden menjawab bahwa ia mengikuti kegiatan politik informal. Dan sisanya sebanyak 1 orang responden menjawab sangat mengikuti kegiatan tersebut.

Secara umum ketertarikan kaum laki-laki terhadap politik dibandingkan dengan perempuan lebih besar. Hal ini relevan dengan data yang ditunjukkan bahwa presentase responden laki-laki mengikuti diskusi maupun kegiatan politik seperti advokasi kebijakan publik lebih besar dibanding responden perempuan. Adanya partisipasi juga dapat dilihat dari perjuangan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas netra melalui audiensi dengan KPU Kabupaten Sleman yang menuntut agar template pada Pilkada Sleman 2015 dipenuhi sepenuhnya agar dapat mempermudah gerak mereka ketika pelaksanaan pemungutan suara. Partisipasi lain juga dapat dilihat dari aktivitas beberapa organisasi penyandang disabilitas dalam Konvensi Masyarakat Sipil Jogja yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan pemilu inklusif pada Pilkada 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait kegiatan politik informal penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015

Grafik. 3.19

Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Kegiatan Politik Informal



Sumber : data primer yang diolah (2016)

9) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Informasi Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan informasi pilkada pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.23
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Informasi Pilkada

sex * p9 Crosstabulation

			p9				Total
			tidak cukup	sedikit cukup	cukup	sangat cukup	
sex	laki-laki	Count	19	24	8	4	55
		% within sex	34.5%	43.6%	14.5%	7.3%	100.0%
		% within p9	40.4%	72.7%	88.9%	80.0%	58.5%
		% of Total	20.2%	25.5%	8.5%	4.3%	58.5%
	perempuan	Count	28	9	1	1	39
		% within sex	71.8%	23.1%	2.6%	2.6%	100.0%
		% within p9	59.6%	27.3%	11.1%	20.0%	41.5%
		% of Total	29.8%	9.6%	1.1%	1.1%	41.5%
Total	Count	47	33	9	5	94	
	% within sex	50.0%	35.1%	9.6%	5.3%	100.0%	
	% within p9	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	35.1%	9.6%	5.3%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

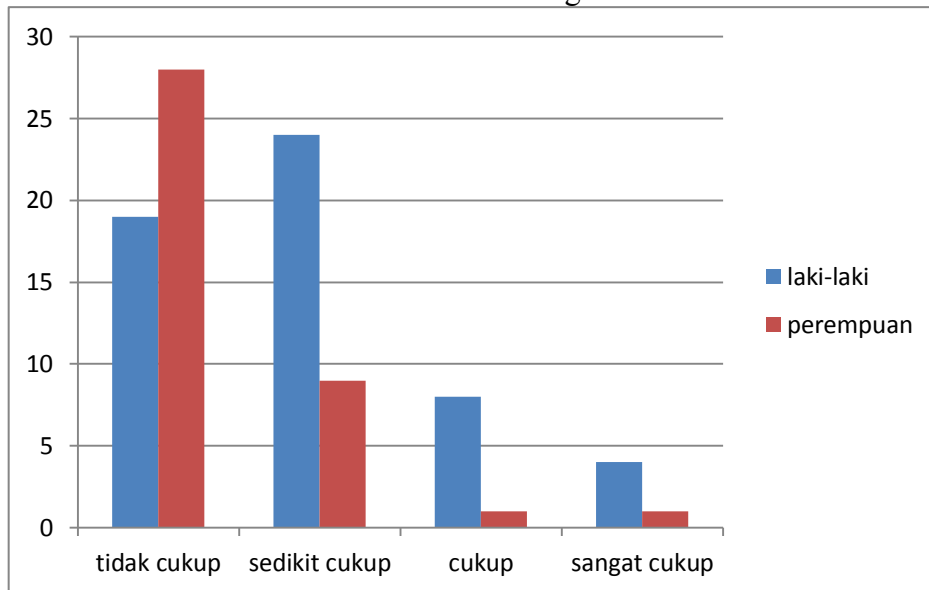
Dari data tersebut dapat diinterpretasikan analisa antara variabel jenis kelamin dengan informasi yang diterima terkait Pilkada sleman 2015. Responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 20,2% atau sekitar 19 orang menyatakan bahwa informasi pilkada tidak cukup. Kemudian sejumlah 24 responden menjawab sedikit cukup. Hanya sekitar 8 orang responden dengan jenis kelamin laki-laki yang menjawab informasi yang diterima sudahlah cukup. 4 responden lainnya menjawab informasi tersebut sudah sangat cukup diterima.

Responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 28 orang atau sekitar 29,8% menjawab informasi terkait pilkad tidaklah cukup. Diikuti sejumlah 9 orang atau 9,6% responden menjawab informasi yang diterima kurang dari cukup. Hanya dua responden yang menjawab bahwa informasi yang diterima terkait Pilkada sleman 2015 sudah cukup dan bahkan sangat cukup.

Seperti analisa pada bab sebelumnya bahwa secara umum penyandang disabilitas memerlukan media informasi dan media sosialisasi yang aksesibel sekaligus informatif. Baik responden laki-laki maupun responden perempuan mayoritas menyatakan informasi yang dapat diserap terkait Pilkada sangatlah minim. Beberapa inovasi memang sudah dilakukan oleh pihak KPU Sleman melalui media “ular tangga pemilu” dan CD sosialisasi akan tetapi penyebaran dan konten informasi tidak representatif diberikan kepada setiap penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait informasi Pilkada yang diterima penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015

Grafik. 3.20
Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Informasi Pilkada



Sumber : data primer yang diolah (2016)

10) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Aksesibilitas Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan variabel aksesibilitas pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.24
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Aksesibilitas Pilkada

sex * p10 Crosstabulation

			Pertanyaan nomor 10				Total
			tidak mudah	cukup mudah	mudah	sangat mudah	
sex	laki-laki	Count	11	16	22	6	55
		% within sex	20.0%	29.1%	40.0%	10.9%	100.0%
		% within p10	39.3%	48.5%	84.6%	85.7%	58.5%
		% of Total	11.7%	17.0%	23.4%	6.4%	58.5%
	perempuan	Count	17	17	4	1	39
		% within sex	43.6%	43.6%	10.3%	2.6%	100.0%
		% within p10	60.7%	51.5%	15.4%	14.3%	41.5%
		% of Total	18.1%	18.1%	4.3%	1.1%	41.5%
Total	Count	28	33	26	7	94	
	% within sex	29.8%	35.1%	27.7%	7.4%	100.0%	
	% within p10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	29.8%	35.1%	27.7%	7.4%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 11,7 % responden menjawab aksesibilitas pada pilkada sulit atau tidak mudah. Kemudian sejumlah 17 % responden atau sekitar 16 orang menjawab cukup mudah. Sekitar 23,4% responden dengan jenis kelamin laki-laki menjawab aksesibilitas Pilkada Sleman 2015 mudah. Dan sisanya sekitar 6,4% menjawab sangat mudah.

Reponden perempuan sejumlah 18,1% atau sekitar 17 orang menjawab aksesibilitas Pilkada tidak mudah. Diikuti dengan jawaban responden sebesar 17 responden yang menyatakan aksesibilitas cukup mudah. Responden sejumlah 4,3 % menjawab mudah dan 1 orang responden menyatakan aksesibilitas pada Pilkada Sleman 2015 sangatlah mudah.

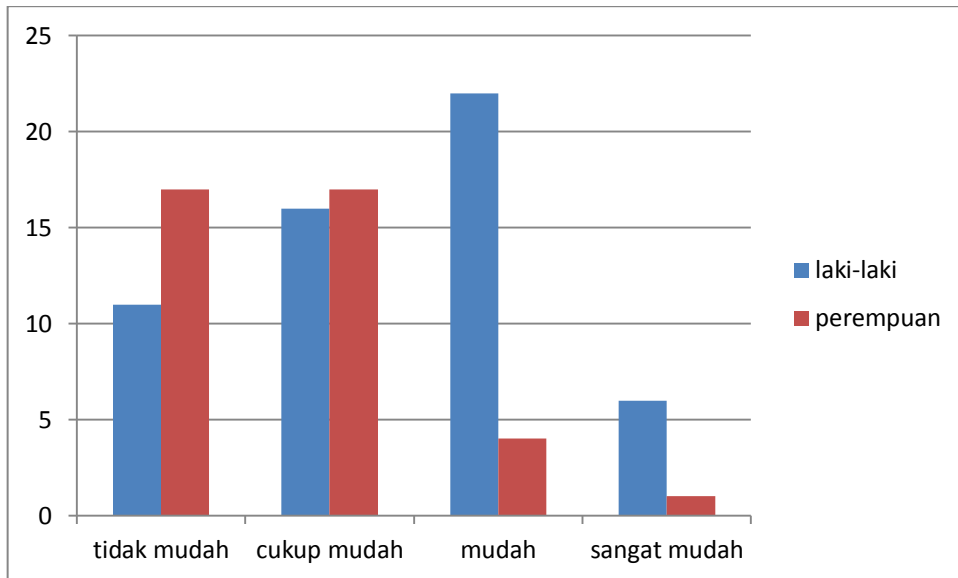
Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwasanya masyarakat disabilitas mengaku cukup aksesibel ketika pelaksanaan Pilkada 2015 berlangsung. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang tidak dapat mengaksesnya secara utuh dan mandiri. Dengan kata lain secara umum penyandang disabilitas memerlukan pihak lain baik keluarga ataupun pendamping yang dapat membantu mobilitasnya ketika Pilkada berlangsung.

”saya tidak nyoblos kemarin pemilu, rumah saya jauh dengan tempat nyoblos. Tidak ada yang mengantar” (wawancara Yanto penyandang disabilitas ganda tanggal 16 Maret 2016)

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait variabel aksesibilitas yang diterima penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.21

Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Aksesibilitas Pilkada



Sumber : data primer yang diolah (2016)

11) Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Lingkungan

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jenis kelamin dengan variabel lingkungan pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.25
Analisa Silang Antara Jenis Kelamin dengan Lingkungan

sex * p11 Crosstabulation

			p11				Total
			tidak mendukung	cukup mendukung	mendukung	sangat mendukung	
sex	laki-laki	Count	11	12	23	9	55
		% within sex	20.0%	21.8%	41.8%	16.4%	100.0%
		% within p11	47.8%	38.7%	76.7%	90.0%	58.5%
		% of Total	11.7%	12.8%	24.5%	9.6%	58.5%
	perempuan	Count	12	19	7	1	39
		% within sex	30.8%	48.7%	17.9%	2.6%	100.0%
		% within p11	52.2%	61.3%	23.3%	10.0%	41.5%
		% of Total	12.8%	20.2%	7.4%	1.1%	41.5%
Total	Count	23	31	30	10	94	
	% within sex	24.5%	33.0%	31.9%	10.6%	100.0%	
	% within p11	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	24.5%	33.0%	31.9%	10.6%	100.0%	

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari data diatas dapat diinterpretasikan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 11,7 % dari total responden atau sekitar 11 orang menyatakan bahwa lingkungan ataupun keluarga maupun teman tidak mendukung dalam Pilkada Sleman 2015 silam. Diikuti sebesar 12,8 % responden yang menyatakan cukup mendukung. Responden yang menjawab mendukung sebesar 24,5% atau sekitar 23 orang dan bahkan sekitar 9 orang responden menjawab sangat mendukung.

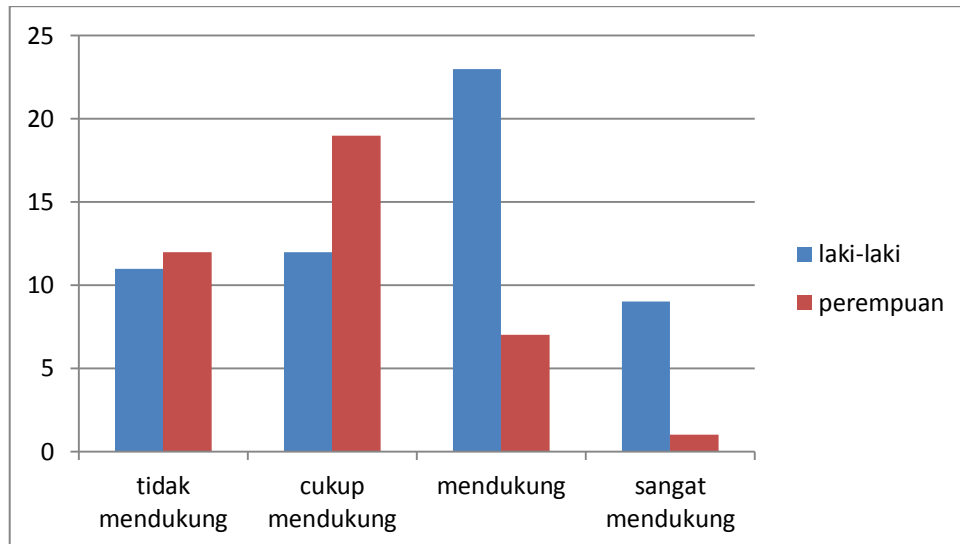
Responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 12 oang atau 12,8% dari responden total menjawab lingkungan tidak mendukung ketika Pilkada berlangsung. Diikuti sejumlah 20,2% responden yang menjawab cukup didukung oleh keluarga dalam pelaksanaan Pilkada sleman 2015. Hanya sekitar 7 orang atau 7,4% responden yang menjawab didukung oleh keluarga maupun lingkungan.

Dan sisanya sebanyak satu responden yang menjawab sangat didukung dalam pelaksanaan Pilkada Sleman 2015.

Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat bahkan keluarga penyandang disabilitas yang memberikan stigma negatif terhadap mereka yang seharusnya mempunyai kesetaraan hak seperti masyarakat pada umumnya. Dari keterangan yang peneliti peroleh bahwa sebagian besar penyandang disabilitas yang turut serta dalam Pilkada Sleman 2015 tidak lepas dari bantuan pihak ketiga yaitu keluarga maupun pendamping lainnya.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kelamin dan jawaban responden terkait variabel lingkungan yang diterima penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.22
Bar Chart Antara Jenis Kelamin dengan Lingkungan



Sumber : data primer yang diolah (2016)

2. Tingkat Pendidikan

a. Pra Pemilihan

1) Tingkat pendidikan dengan sosialisasi Pilkada

Analisa berikut ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan sosialisasi Pilkada pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.26
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Sosialisasi Pilkada

pendidikan * p1 Crosstabulation

			p1				Total
			tidak mengikuti	kadang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
pendidikan	SD	Count	16	11	9	2	38
		% within pendidikan	42.1%	28.9%	23.7%	5.3%	100.0%
		% within p1	51.6%	33.3%	39.1%	28.6%	40.4%
		% of Total	17.0%	11.7%	9.6%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	18	6	5	44
		% within pendidikan	34.1%	40.9%	13.6%	11.4%	100.0%
		% within p1	48.4%	54.5%	26.1%	71.4%	46.8%
		% of Total	16.0%	19.1%	6.4%	5.3%	46.8%
	SMA	Count	0	3	7	0	10
		% within pendidikan	.0%	30.0%	70.0%	.0%	100.0%
		% within p1	.0%	9.1%	30.4%	.0%	10.6%
		% of Total	.0%	3.2%	7.4%	.0%	10.6%
	SMA KEATAS	Count	0	1	1	0	2
		% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p1	.0%	3.0%	4.3%	.0%	2.1%
		% of Total	.0%	1.1%	1.1%	.0%	2.1%
Total	Count	31	33	23	7	94	
	% within pendidikan	33.0%	35.1%	24.5%	7.4%	100.0%	
	% within p1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	33.0%	35.1%	24.5%	7.4%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD dengan jumlah 40,4% dari total responden menjawab tidak mengikuti sosialisasi sebanyak 16 responden. Diikuti selanjutnya sejumlah 11 responden menjawab terkadang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan KPU Sleman. Hanya sekitar 9 responden yang menjawab mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Sementara sisanya sekitar 2 responden dengan tingkat pendidikan SD menjawab selalu mengikuti kegiatan tersebut.

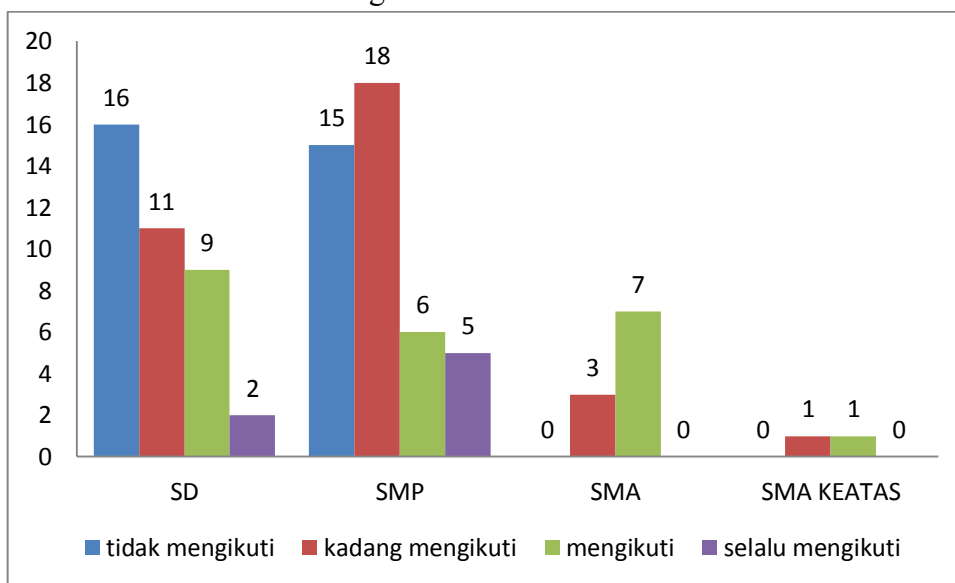
Responden dengan tingkat pendidikan SMP menjawab tidak mengikuti kegiatan sosialisasi KPU sebanyak 15 responden atau sekitar 16% dari total responden. Selanjutnya sebesar 19,1 % responden menjawab terkadang mengikuti sosialisasi tersebut. Hanya sekitar 6 responden atau sekitar 6,4% menjawab mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan KPU Sleman. Dan sisanya sejumlah 5 responden menjawab selalu mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan SMA sejumlah 3 responden menjawab terkadang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan KPU Sleman dan hanya 7 Responden yang menjawab mengikuti kegiatan tersebut. Responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing masing sejumlah satu responden menjawab terkadang mengikuti kegiatan dan mengikuti kegiatan sosialisasi Pilkada Sleman 2015.

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kecenderungan mayoritas responden untuk turut serta berpartisipasi dalam sosialisasi Pilkada berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan responden. Responden dengan tingkat pendidikan SD dan SMP memiliki mobilitas yang lebih tinggi untuk turut serta dalam sosialisasi Pilkada dibanding responden dengan tingkat pendidikan di atasnya. Meskipun pada prakteknya banyak dari responden dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yang tidak bisa mengikuti jalannya kegiatan dikarenakan beberapa faktor seperti aksesibilitas dan minimnya informasi. Akan tetapi mayoritas responden menunjukkan keinginan yang tinggi untuk mengikuti sosialisasi Pilkada.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait sosialisasi Pilkada yang diterima penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.23
Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Pilkada



Sumber : data primer yang diolah (2016)

2) Tingkat pendidikan dengan antusiasme dalam Pilkada

Analisa berikut ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan sosialisasi Pilkada pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.27
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Antusiasme

pendidikan * p2 Crosstabulation

			p2				Total
			tidak antusias	sedikit antusias	antusias	sangat antusias	
pendidikan	SD	Count	11	11	14	2	38
		% within pendidikan	28.9%	28.9%	36.8%	5.3%	100.0%
		% within p2	68.8%	50.0%	31.1%	18.2%	40.4%
		% of Total	11.7%	11.7%	14.9%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	5	10	24	5	44
		% within pendidikan	11.4%	22.7%	54.5%	11.4%	100.0%
		% within p2	31.3%	45.5%	53.3%	45.5%	46.8%
		% of Total	5.3%	10.6%	25.5%	5.3%	46.8%
	SMA	Count	0	0	6	4	10
		% within pendidikan	.0%	.0%	60.0%	40.0%	100.0%
		% within p2	.0%	.0%	13.3%	36.4%	10.6%
		% of Total	.0%	.0%	6.4%	4.3%	10.6%
	SMA KEATAS	Count	0	1	1	0	2
		% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p2	.0%	4.5%	2.2%	.0%	2.1%
		% of Total	.0%	1.1%	1.1%	.0%	2.1%
Total	Count	16	22	45	11	94	
	% within pendidikan	17.0%	23.4%	47.9%	11.7%	100.0%	
	% within p2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	17.0%	23.4%	47.9%	11.7%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sejumlah 11 orang menyatakan diriya tidak antusias dalam mengikuti Pilkada Sleman 2015. Selanjutnya sekitar 11 orang menjawab kurang begitu antusias dalam mengikuti sosialisasi. Responden dengan jawaban antusias berjumlah 14 responden. Diikuti 2 orang atau responden yang menyatakan dirinya sangat antusias dalam terlibat pada Pilkada Sleman 2015.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP sejumlah 5,3% atau 5 orang menjawab tidak antusias dalam mengikuti ataupun terlibat dalam Pilkada Sleman

2015. Selanjutnya sejumlah 10 orang dengan tingkat pendidikan SMP menjawab kurang antusias. Data menunjukkan sekitar 24 responden dengan tingkat pendidikan SMP menjawab antusias dalam mengikuti Pilkada Sleman. Diikuti 5 orang yang menjawab sangat antusias.

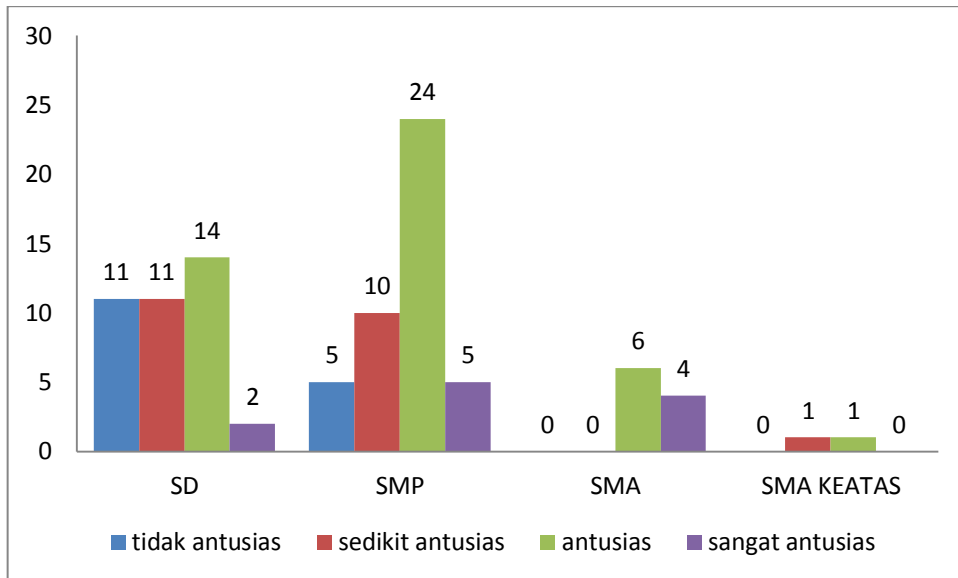
Responden dengan tingkat pendidikan SMA sejumlah 6 responden menjawab antusias dalam mengikuti Pilkada Sleman 2015 dan 4 responden menjawab sangat antusias. Sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing-masing satu responden menjawab kurang antusias dan satu responden lain menjawab antusias.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat penyandang disabilitas menurut distribusi tingkat pendidikan antusias dalam mengikuti Pilkada sleman 2015. Berdasarkan analisa silang tersebut terlihat tidak ada perbedaan signifikan dari masing-masing tingkat pendidikan responden. Antusiasme tersebut diiringi harapan masyarakat penyandang disabilitas akan terpenuhinya hak dan kesetaraan dalam semua sektor termasuk hak pilih dalam Pilkada sleman 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait antusiasme penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.24

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Antusiasme Pilkada



Sumber : data primer yang diolah (2016)

3) Tingkat pendidikan dengan pemahaman calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Analisa berikut ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemahaman calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.28
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Pemahaman Calon
pendidikan * p3 Crosstabulation

			p3				Total
			tidak tahu	sedikit tahu	tahu	sangat tahu	
pendidikan	SD	Count	11	11	14	2	38
		% within pendidikan	28.9%	28.9%	36.8%	5.3%	100.0%
		% within p3	42.3%	33.3%	51.9%	25.0%	40.4%
		% of Total	11.7%	11.7%	14.9%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	18	6	5	44
		% within pendidikan	34.1%	40.9%	13.6%	11.4%	100.0%
		% within p3	57.7%	54.5%	22.2%	62.5%	46.8%
		% of Total	16.0%	19.1%	6.4%	5.3%	46.8%
	SMA	Count	0	3	6	1	10
		% within pendidikan	.0%	30.0%	60.0%	10.0%	100.0%
		% within p3	.0%	9.1%	22.2%	12.5%	10.6%
		% of Total	.0%	3.2%	6.4%	1.1%	10.6%
SMA KEATAS	Count	0	1	1	0	2	
	% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%	
	% within p3	.0%	3.0%	3.7%	.0%	2.1%	
	% of Total	.0%	1.1%	1.1%	.0%	2.1%	
Total	Count	26	33	27	8	94	
	% within pendidikan	27.7%	35.1%	28.7%	8.5%	100.0%	
	% within p3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	27.7%	35.1%	28.7%	8.5%	100.0%	

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 11 responden atau sekitar 11,7% dari total responden menjawab tidak tahu terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Sleman 2015. Diikuti sejumlah 11,7 % responden atau 11 responden yang menjawab kurang mengetahui calon dalam Pilkada tersebut. Sekitar 14,9% responden menjawab mengetahui calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan sisanya sebanyak 2,1 % atau 2 orang responden saja yang

menjawab sangat mengetahui calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah pada Pilkada sleman 2015.

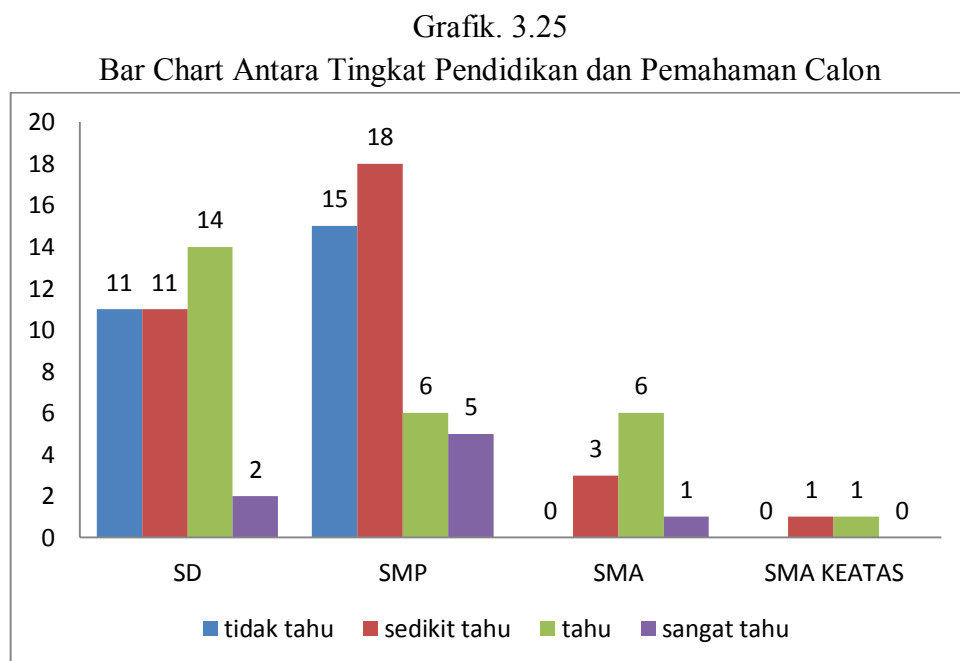
Responden dengan tingkat pendidikan SMP sejumlah 15 orang atau 16% dari total responden menjawab tidak tahu terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Sleman 2015. Diikuti sejumlah 18 orang atau sekitar 19,1% responden menjawab kurang mengetahui. Sekitar 6,4 % responden menjawab mengetahui calon dalam Pilkada sleman 2015. Dan sisanya sekitar 5,3 % atau 5 responden menyatakan dirinya sangat mengetahui calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Sleman 2015.

Responden dengan tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 3 orang menjawab kurang mengetahui calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Sejumlah 6 responden menjawab mengetahui dan sisanya 1 responden dengan tingkat pendidikan SMA menjawab sangat mengetahui. Responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas menjawab kurang mengetahui dan mengaetaahui masing-masing dengan satu responden.

Pemahaman akan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada sleman dipengaruhi oleh penyerapan informasi yang diterima oleh penyandang disabilitas. Terlihat dari data diatas bahwa responden dengan tingkat pendidikan rendah kurang dapat menyerap informasi terkait siapa yang akan maju dalam Pilkada Sleman 2015. Sementara responden dengan tingkat pendidikan lebih tinggi semakin mudah menyerap segala informasi yang berkaitan dengan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun secara parsial, penyebab angka pemahaman yang kurang di kalangan penyandang disabilitas lebih

disebabkan oleh minimnya media aksesibel yang dapat mereka gunakan untuk menelaah dan mengenal lebih jauh calon yang akan maju dalam Pilada sesuai dengan kebutuhan ataupun jenis kedisabilitas mereka.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait antusiasme penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.



Sumber : data primer yang diolah (2016)

4) Tingkat Pendidikan Dengan Kegiatan Kampanye

Analisa berikut ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan kegiatan kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.29
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Kegiatan Kampanye
pendidikan * p4 Crosstabulation

			p4				Total
			tidak mengikuti	kadang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
pendidikan	SD	Count	22	14	0	2	38
		% within pendidikan	57.9%	36.8%	.0%	5.3%	100.0%
		% within p4	37.9%	58.3%	.0%	100.0%	40.4%
		% of Total	23.4%	14.9%	.0%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	32	7	5	0	44
		% within pendidikan	72.7%	15.9%	11.4%	.0%	100.0%
		% within p4	55.2%	29.2%	50.0%	.0%	46.8%
		% of Total	34.0%	7.4%	5.3%	.0%	46.8%
	SMA	Count	3	2	5	0	10
		% within pendidikan	30.0%	20.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p4	5.2%	8.3%	50.0%	.0%	10.6%
		% of Total	3.2%	2.1%	5.3%	.0%	10.6%
SMA KEATAS	Count	1	1	0	0	2	
	% within pendidikan	50.0%	50.0%	.0%	.0%	100.0%	
	% within p4	1.7%	4.2%	.0%	.0%	2.1%	
	% of Total	1.1%	1.1%	.0%	.0%	2.1%	
Total	Count	58	24	10	2	94	
	% within pendidikan	61.7%	25.5%	10.6%	2.1%	100.0%	
	% within p4	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	61.7%	25.5%	10.6%	2.1%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sejumlah 22 orang atau sekitar 23,4% responden menjawab tidak mengikuti kegiatan kampanye. Diikuti 14 orang atau sekitar 14,9% responden menjawab terkadang mengikuti kegiatan kampanye. Sisanya sebanyak dua orang responden menjawab selalu mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 32 orang menjawab tidak mengikuti kegiatan kampanye pada Pilkada 2015. 7 responden atau sekitar

7,4% menjawab terkadang mengikuti kampanye. Selanjutnya 5 orang dengan tingkat pendidikan SMP menjawab mengikuti kegiatan kampanye pada Pilkada Sleman 2015.

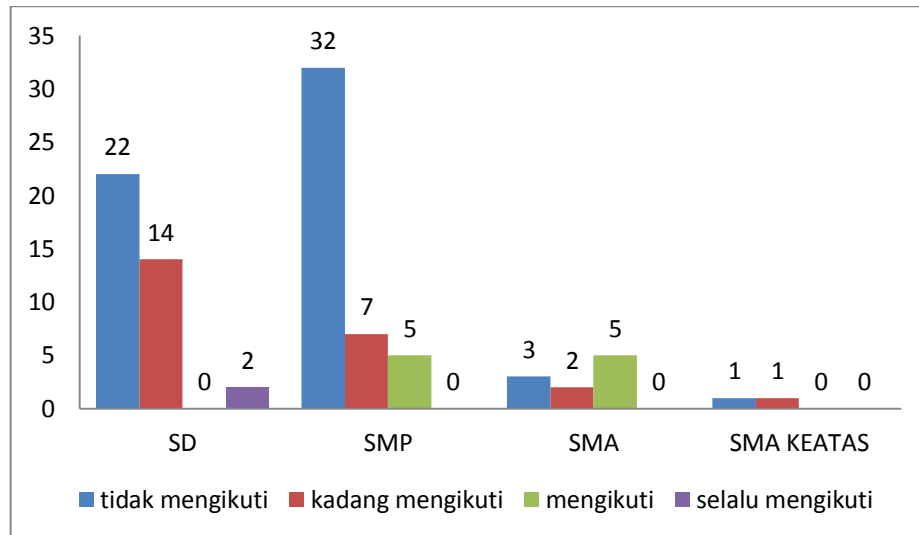
Responden dengan tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 3 orang atau 3,2 % dari total responden menyatakan dirinya tidak mengikuti ataupun terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada lalu. Diikuti sejumlah 2 orang responden yang mengaku terkadang mengikuti kegiatan tersebut. Hanya sekitar 5,3% responden atau 5 orang yang menjawab mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing masing 1 orang menjawab tidak mengikuti dan kadang mengikuti kampanye pada Pilkada Sleman 2015.

Dari data tersebut terlihat tidak ada perbedaan signifikan yang ditunjukkan dari masing-masing tingkat pendidikan terhadap kegiatan kampanye. Mayoritas dari penyandang disabilitas tidak mengikuti kegiatan kampanye dikarenakan faktor mobilitas yang terbatas. Hampir sekitar 70% responden tidak menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait kegiatan kampanye yang diikuti penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.26

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Kegiatan Kampanye



Sumber : data primer yang diolah (2016)

b. Pemilihan

5) Tingkat Pendidikan dengan Pemberian Hak Suara

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemberian hak suara penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.30
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Pemberian Hak Suara
pendidikan * p5 Crosstabulation

			p5		Total
			tidak memberikan suara	memberikan suara	
pendidikan	SD	Count	15	23	38
		% within pendidikan	39.5%	60.5%	100.0%
		% within p5	50.0%	35.9%	40.4%
		% of Total	16.0%	24.5%	40.4%
	SMP	Count	15	29	44
		% within pendidikan	34.1%	65.9%	100.0%
		% within p5	50.0%	45.3%	46.8%
		% of Total	16.0%	30.9%	46.8%
	SMA	Count	0	10	10
		% within pendidikan	.0%	100.0%	100.0%
		% within p5	.0%	15.6%	10.6%
		% of Total	.0%	10.6%	10.6%
SMA KEATAS	Count	0	2	2	
	% within pendidikan	.0%	100.0%	100.0%	
	% within p5	.0%	3.1%	2.1%	
	% of Total	.0%	2.1%	2.1%	
Total	Count	30	64	94	
	% within pendidikan	31.9%	68.1%	100.0%	
	% within p5	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	31.9%	68.1%	100.0%	

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sejumlah 15 responden dengan tingkat pendidikan SD menjawab tidak memberikan hak suara pada Pilkada Sleman 2015. Sementara sisanya sejumlah 23 reponden atau sekitar 24,5% dari total responden responden menjawab memberikan suara pada Pilkada Sleman tersebut. Jawaban responden dengan tingkat pendidikan SMP adalah 16% tidak memberikan suara dan 21% atau sekitar 29 responden dengan tingkat pendidikan SMP menyatakan memberikan suara pada Pemilukada Sleman 2015. Sementara itu masing-masing responden dengan tingkat pendidikan SMA dan SMA keatas

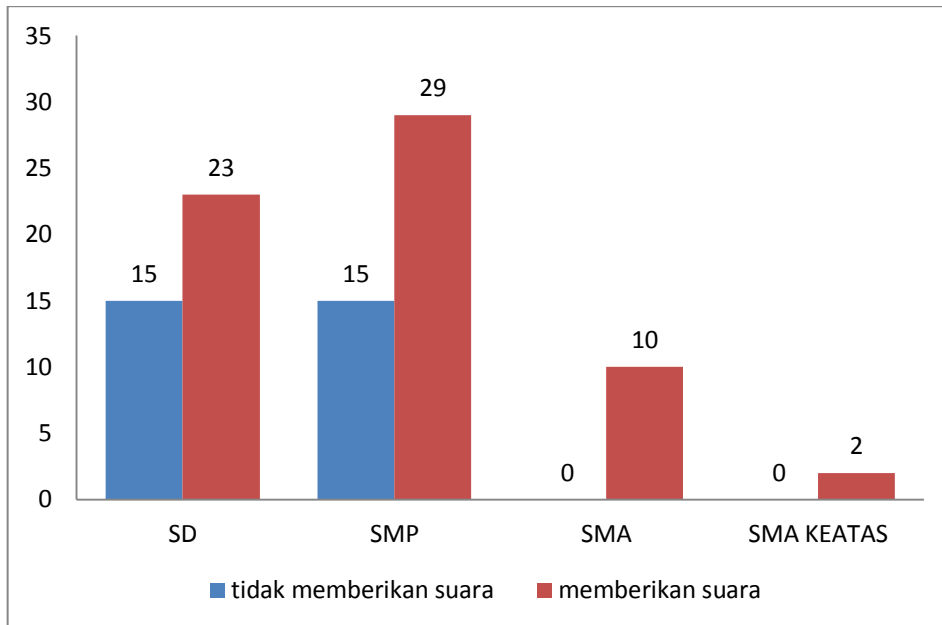
memberikan suara pada pemilukada 2015 dengan total 10 responden dan 2 responden.

Hal ini memberikan gambaran bahwa mayoritas responden menggunakan hak suaranya pada Pemilukada Sleman 2015. Ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan keikutsertaan responden memberikah hak pilihnya pada Pemilukada Sleman 2015. Hal ini dikarenakan beberapa responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi atau SMA keatas sudah melek politik terbukti dengan keaktifan dan keikutsertaan mereka dalam organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi difabel.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait pemberian hak suara penyandang disabilitas Sleman pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015

Grafik. 3.27

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Pemberian Suara



Sumber : data primer yang diolah (2016)

6) Tingkat pendidikan dengan Kesadaran Mengikuti Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran mengikuti pilkadapenyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.31
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Kesadaran Pilkada
pendidikan * p6 Crosstabulation

			p6				Total
			tidak sadar diri	kurang sadar diri	sadar diri	sangat sadar diri	
pendidikan	SD	Count	6	16	14	2	38
		% within pendidikan	15.8%	42.1%	36.8%	5.3%	100.0%
		% within p6	28.6%	72.7%	38.9%	13.3%	40.4%
		% of Total	6.4%	17.0%	14.9%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	5	16	8	44
		% within pendidikan	34.1%	11.4%	36.4%	18.2%	100.0%
		% within p6	71.4%	22.7%	44.4%	53.3%	46.8%
		% of Total	16.0%	5.3%	17.0%	8.5%	46.8%
	SMA	Count	0	0	5	5	10
		% within pendidikan	.0%	.0%	50.0%	50.0%	100.0%
		% within p6	.0%	.0%	13.9%	33.3%	10.6%
		% of Total	.0%	.0%	5.3%	5.3%	10.6%
SMA KEATAS	Count	0	1	1	0	2	
	% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%	
	% within p6	.0%	4.5%	2.8%	.0%	2.1%	
	% of Total	.0%	1.1%	1.1%	.0%	2.1%	
Total	Count	21	22	36	15	94	
	% within pendidikan	22.3%	23.4%	38.3%	16.0%	100.0%	
	% within p6	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	22.3%	23.4%	38.3%	16.0%	100.0%	

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sejumlah responden dengan tingkat pendidikan SD menjawab tidak mempunyai kessadaran sendiri dalam Pemilukada sleman 2015. Diikuti sejumlah 16 responden atau sekitar 17 % dari total responden memiliki tingkat kesadaran diri yang kurang. Sekitar 14 responden menjawab memiliki kesadaran diri dalam Pemilukada 2015 dan sisanya sekitar 2 responden menjawab sangat memiliki kesadaran untuk mengikuti Pemilukada Sleman 2015.

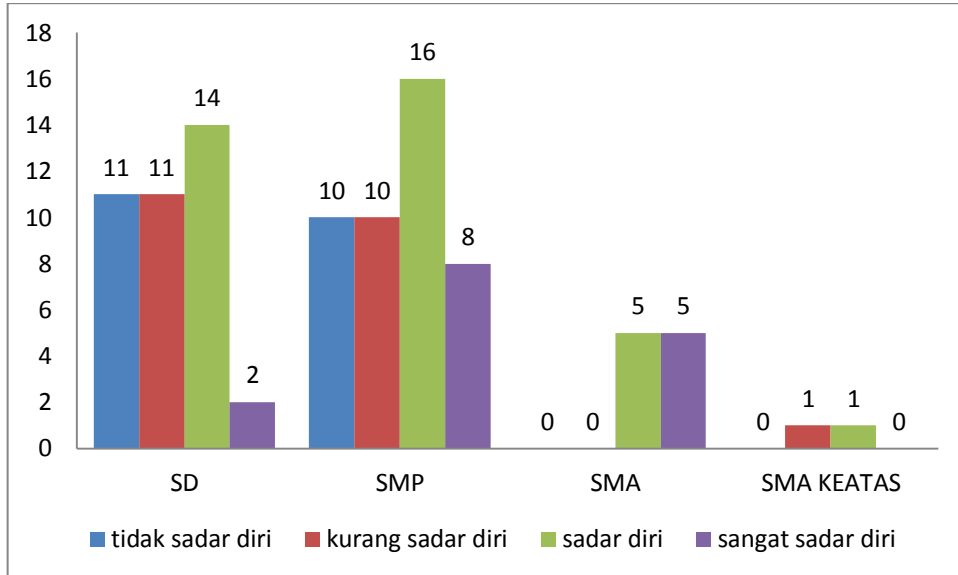
Sementara itu responden dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 15 orang menyatakan dirinya tidak memiliki kesadaran diri dalam Pemilu Sleman 2015. Diikuti 5 orang yang menjawab kurang memiliki kesadaran diri. Sekitar 16 responden atau 17% dari total responden menjawab memiliki kesadaran diri dalam mengikuti Pemilu Sleman 2015. Dan sisanya sekitar 8 Responden menjawab sangat memiliki kesadaran dalam mengikuti Pemilu Sleman 2015.

Responden dengan tingkat pendidikan SMA dan SMA keatas memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam mengikuti Pemilu Sleman 2015. Hal ini dibuktikan dari sejumlah 10 responden yang menjawab memiliki kesadaran dan % diantaranya bahkan menjawab sangat memiliki kesadaran. Sementara responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing-masing 1 responden menjawab kurang sadar dan 1 responden menjawab sadar diri.

Dari analisa diatas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat penyandang disabilitas masih tergolong rendah seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini dimungkinkan serapan informasi dan edukasi tentang hak politik belum dipahami secara maksimal.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait kesadaran mengikuti Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015

Grafik. 3
Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Diri



Sumber : data primer yang diolah (2016)

c. Pasca Pemilihan

7) Tingkat pendidikan dengan dengan Kegiatan Penghitungan Suara

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan kegiatan penghitungan suara penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.32

Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Kegiatan Penghitungan Suara

pendidikan * p7 Crosstabulation

			p7				Total
			tidak mengikuti	kurang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
pendidikan	SD	Count	22	8	6	2	38
		% within pendidikan	57.9%	21.1%	15.8%	5.3%	100.0%
		% within p7	57.9%	27.6%	28.6%	33.3%	40.4%
		% of Total	23.4%	8.5%	6.4%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	18	7	4	44
		% within pendidikan	34.1%	40.9%	15.9%	9.1%	100.0%
		% within p7	39.5%	62.1%	33.3%	66.7%	46.8%
		% of Total	16.0%	19.1%	7.4%	4.3%	46.8%
	SMA	Count	0	3	7	0	10
		% within pendidikan	.0%	30.0%	70.0%	.0%	100.0%
		% within p7	.0%	10.3%	33.3%	.0%	10.6%
		% of Total	.0%	3.2%	7.4%	.0%	10.6%
	SMA KEATAS	Count	1	0	1	0	2
		% within pendidikan	50.0%	.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p7	2.6%	.0%	4.8%	.0%	2.1%
		% of Total	1.1%	.0%	1.1%	.0%	2.1%
Total	Count	38	29	21	6	94	
	% within pendidikan	40.4%	30.9%	22.3%	6.4%	100.0%	
	% within p7	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	40.4%	30.9%	22.3%	6.4%	100.0%	

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sejumlah 23,4% atau sekitar 22 orang menjawab tidak mengikuti kegiatan. Diikuti sejumlah 8,5% responden atau sekitar 8 orang menjawab kurang mengikuti kegiatan. Dan hanya 8 orang dengan masing-masing 6 responden menjawab mengikuti dan 2 responden menjawab sangat mengikui kegiatan penghitungan suara pada Pemilu pada 2015.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP sejumlah 16% menjawab tidak mengikuti kegiatan penghitungan suara. Diikuti dengan sejumlah 19%

responden menjawab kurang mengikuti. 7,4% responden menjawab mengikuti dan 4,3 % responden menjawab sangat mengikuti.

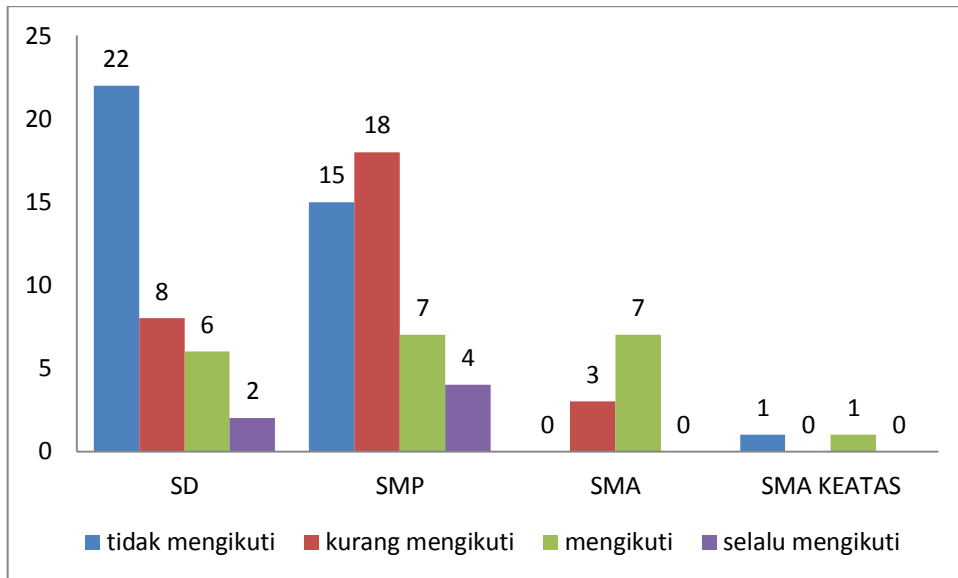
Sementara itu responden dengan tingkat pendidikan SMA sejumlah 3 responden menjawab kurang mengikuti dan sisanya 7 responden menjawab mengikuti kegiatan tersebut. Reponden dengan tingkat pendidikan SMA Keatas masing-masing satu responden menjawab tidak mengikuti dan mengikuti kegiatan penghitungan suara pada Pemilukada Sleman 2015.

Dari analisa tersebut dapat dilihat bahwa ada korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan kegiatan pasca pemilu salah satunya kegiatan penghitungan suara. Mayoritas responden merasa tidak mengetahui dan tidak merasa perlu lagi mengikuti kegiatan pasca pemilu yang berlangsung pada Pemilukada 2016.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait kegiatan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.29

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Penghitungan Suara



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

8) Tingkat Pendidikan dengan Kegiatan Politik Informal

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan kegiatan penghitungan suara penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.33
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Kegiatan Politik Informal
pendidikan * p8 Crosstabulation

			p8				Total
			tidak mengikuti	kurang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
pendidikan	SD	Count	22	13	1	2	38
		% within pendidikan	57.9%	34.2%	2.6%	5.3%	100.0%
		% within p8	57.9%	37.1%	6.3%	40.0%	40.4%
		% of Total	23.4%	13.8%	1.1%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	18	8	3	44
		% within pendidikan	34.1%	40.9%	18.2%	6.8%	100.0%
		% within p8	39.5%	51.4%	50.0%	60.0%	46.8%
		% of Total	16.0%	19.1%	8.5%	3.2%	46.8%
	SMA	Count	0	3	7	0	10
		% within pendidikan	.0%	30.0%	70.0%	.0%	100.0%
		% within p8	.0%	8.6%	43.8%	.0%	10.6%
		% of Total	.0%	3.2%	7.4%	.0%	10.6%
	SMA KEATAS	Count	1	1	0	0	2
		% within pendidikan	50.0%	50.0%	.0%	.0%	100.0%
		% within p8	2.6%	2.9%	.0%	.0%	2.1%
		% of Total	1.1%	1.1%	.0%	.0%	2.1%
Total	Count	38	35	16	5	94	
	% within pendidikan	40.4%	37.2%	17.0%	5.3%	100.0%	
	% within p8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	40.4%	37.2%	17.0%	5.3%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sejumlah 22 responden menjawab tidak mengikuti kegiatan politik informal. Diikuti sejumlah 12 reponden atau sekitar 13,8% dari total responden menjawab kurang mengikuti. Selibihnya sekitar 3 responden menyatakan dirinya mengikuti dan selalu mengikuti kegiatan politik informal.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 16% menjawab tidak mengikuti kegiatan politik informal. Diikuti sejumlah 19% aau 18 responden

menyatakan kurang mengikuti. Dan hanya 10 responden yang menjawab mengikuti kegiatan politik informal pada Pemilukada Sleman 2015.

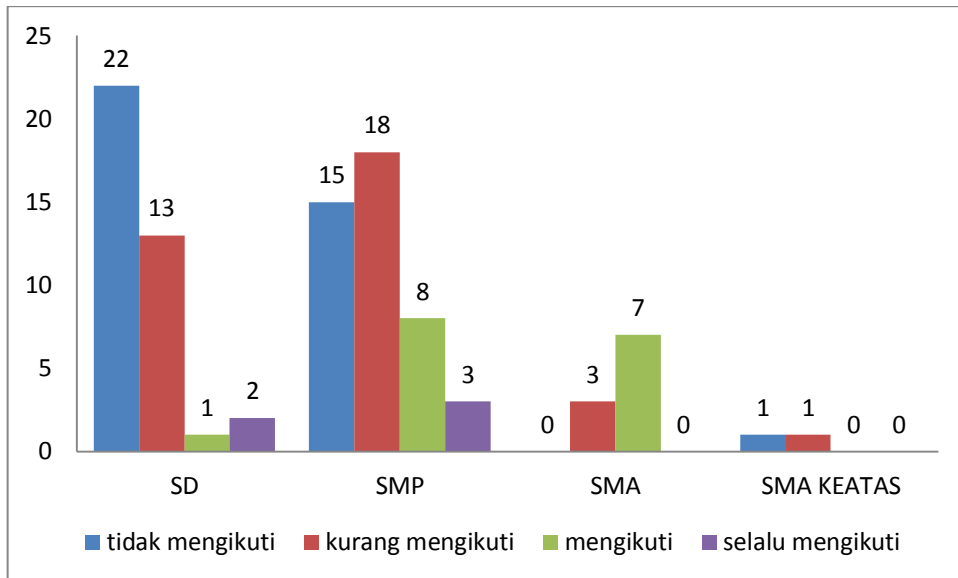
Responden dengan tingkat pendidikan SMA menjawab kurang mengikuti kegiatan sejumlah 3 responden. 7 responden lainnya menjawab mengikuti kegiatan politik informal. Sementara itu responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing-masing 1 responden menjawab tidak mengikuti dan kurang mengikuti kegiatan politik informal.

Dari analisa tabulasi silang diatas dapat dipahami bahwa ketertarikan responden terhadap kegiatan politik informal berdasarkan tingkat pendidikan memiliki korelasi positif. Responden dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung aktif dalam kegiatan organisasi yang merupakan manifestasi keikutsertaan mereka dalam kegiatan politik informal pada Pemilukada Kabupaten Sleman tahun 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait kegiatan politik informal pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.30

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Kegiatan Politik Informal



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

9) Tingkat Pendidikan dengan Informasi terkait Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan informasi yang diterima penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.34
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Informasi Pilkada
pendidikan * p9 Crosstabulation

			p9				Total
			tidak cukup	sedikit cukup	cukup	sangat cukup	
pendidikan	SD	Count	22	14	0	2	38
		% within pendidikan	57.9%	36.8%	.0%	5.3%	100.0%
		% within p9	46.8%	42.4%	.0%	40.0%	40.4%
		% of Total	23.4%	14.9%	.0%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	24	13	4	3	44
		% within pendidikan	54.5%	29.5%	9.1%	6.8%	100.0%
		% within p9	51.1%	39.4%	44.4%	60.0%	46.8%
		% of Total	25.5%	13.8%	4.3%	3.2%	46.8%
	SMA	Count	0	5	5	0	10
		% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p9	.0%	15.2%	55.6%	.0%	10.6%
		% of Total	.0%	5.3%	5.3%	.0%	10.6%
SMA KEATAS	Count	1	1	0	0	2	
	% within pendidikan	50.0%	50.0%	.0%	.0%	100.0%	
	% within p9	2.1%	3.0%	.0%	.0%	2.1%	
	% of Total	1.1%	1.1%	.0%	.0%	2.1%	
Total	Count	47	33	9	5	94	
	% within pendidikan	50.0%	35.1%	9.6%	5.3%	100.0%	
	% within p9	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	35.1%	9.6%	5.3%	100.0%	

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD mayoritas menjawab informasi yang diterima terkait pilkada tidaklah cukup. 23,4% responden menjawab tidak cukup, 14,9 menjawab sedikit cukup, dan 2,1 % menjawab sangat cukup. Responden dengan tingkat pendidikan SMP 25,5 % menjawab tidak cukup, 13,8 % menjawab sedikit cukup, 4,3 % menjawab cukup dan 3,2% menjawab sangat cukup.

Responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 responden menjawab sedikit cukup dan 5 responden menjawab cukup. Sementara respnden

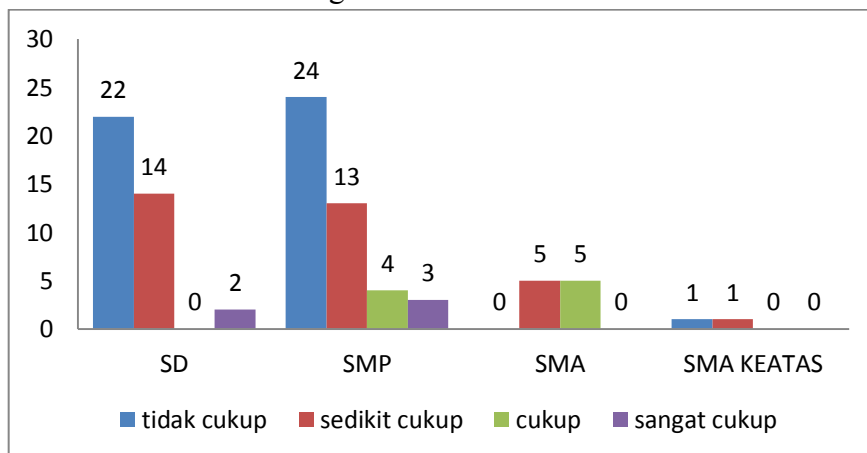
dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing-masing 1 responden menjawab tidak cukup dan sedikit cukup.

Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan memiliki korelasi negatif dengan serapan informasi terkait Pemilu pada Kabupaten Sleman 2015. Hampir 85% responden menyatakan bahwa informasi yang diterima tidaklah cukup dengan distribusi jawaban yang beragam pada masing tingkat pendidikan. Namun dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan rendah cenderung sulit mengakses dan memahami informasi terkait Pemilu tersebut.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait informasi pilkada pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.31

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Informasi Pilkada



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

10) Tingkat Pendidikan dengan Aksesibilitas Pilkada

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.35
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Aksesibilitas Pilkada
pendidikan * p10 Crosstabulation

			p10				Total
			tidak mudah	cukup mudah	mudah	sangat mudah	
pendidikan	SD	Count	13	11	12	2	38
		% within pendidikan	34.2%	28.9%	31.6%	5.3%	100.0%
		% within p10	46.4%	33.3%	46.2%	28.6%	40.4%
		% of Total	13.8%	11.7%	12.8%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	18	6	5	44
		% within pendidikan	34.1%	40.9%	13.6%	11.4%	100.0%
		% within p10	53.6%	54.5%	23.1%	71.4%	46.8%
		% of Total	16.0%	19.1%	6.4%	5.3%	46.8%
	SMA	Count	0	3	7	0	10
		% within pendidikan	.0%	30.0%	70.0%	.0%	100.0%
		% within p10	.0%	9.1%	26.9%	.0%	10.6%
		% of Total	.0%	3.2%	7.4%	.0%	10.6%
	SMA KEATAS	Count	0	1	1	0	2
		% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p10	.0%	3.0%	3.8%	.0%	2.1%
		% of Total	.0%	1.1%	1.1%	.0%	2.1%
Total	Count	28	33	26	7	94	
	% within pendidikan	29.8%	35.1%	27.7%	7.4%	100.0%	
	% within p10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	29.8%	35.1%	27.7%	7.4%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sejumlah 13,3% menjawab aksesibilitas dalam Pemilukada

Sleman 2015 tidak mudah. Diikuti 11,7% responden menjawab cukup mudah. Dan sisanya 12,8% menjawab mudah dan 2 responden menjawab sangat mudah.

Sementara itu responden dengan tingkat pendidikan SMP sejumlah 16% atau sekitar 15 responden menjawab tidak mudah. 19,1% responden menjawab cukup mudah. Hanya sekitar 6,4% responden dengan tingkat pendidikan SMP menjawab mudah dan sisanya 5,3% responden menjawab sangat mudah.

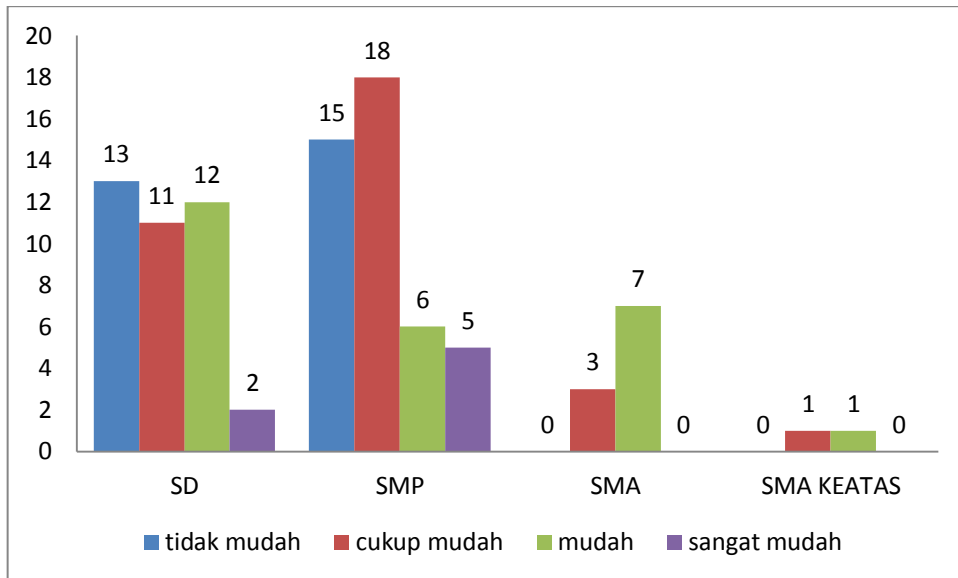
Responden dengan tingkat pendidikan SMA menjawab cukup mudah sebanyak 3 responden. Sementara sisanya sejumlah 7 responden menjawab mudah. Responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing masing satu responden menjawab cukup mudah dan mudah.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa korelasi antara tingkat pendidikan dengan aksesibilitas Pemilukada Sleman 2015 bersifat negatif. Mayoritas responden menyatakan bahwa aksesibilitas pada Pemilukada 2015 dirasa kurang aksesibel terhadap penyandang disabilitas.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait aksesibilitas pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.32

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Aksesibilitas Pemilu



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

11) Tingkat Pendidikan dengan Lingkungan

Analisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan lingkungan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.36
Analisa Silang Antara Tingkat Pendidikan dengan Lingkungan
pendidikan * p11 Crosstabulation

			p11				Total
			tidak mendukung	cukup mendukung	mendukung	sangat mendukung	
pendidikan	SD	Count	8	14	14	2	38
		% within pendidikan	21.1%	36.8%	36.8%	5.3%	100.0%
		% within p11	34.8%	45.2%	46.7%	20.0%	40.4%
		% of Total	8.5%	14.9%	14.9%	2.1%	40.4%
	SMP	Count	15	13	11	5	44
		% within pendidikan	34.1%	29.5%	25.0%	11.4%	100.0%
		% within p11	65.2%	41.9%	36.7%	50.0%	46.8%
		% of Total	16.0%	13.8%	11.7%	5.3%	46.8%
	SMA	Count	0	3	4	3	10
		% within pendidikan	.0%	30.0%	40.0%	30.0%	100.0%
		% within p11	.0%	9.7%	13.3%	30.0%	10.6%
		% of Total	.0%	3.2%	4.3%	3.2%	10.6%
	SMA KEATAS	Count	0	1	1	0	2
		% within pendidikan	.0%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%
		% within p11	.0%	3.2%	3.3%	.0%	2.1%
		% of Total	.0%	1.1%	1.1%	.0%	2.1%
Total	Count	23	31	30	10	94	
	% within pendidikan	24.5%	33.0%	31.9%	10.6%	100.0%	
	% within p11	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	24.5%	33.0%	31.9%	10.6%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sejumlah 8 responden menjawab lingkungan ataupun keluarga tidak mendukung dalam Pemilukada Sleman 2015. 14 responden menjawab cukup mendukung. Hanya sekitar 14 responden menjawab lingkungan mendukung dan sisanya sejumlah 2 responden menyatakan bahwa lingkungan atau keluarga sangat mendukung.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP sejumlah 16 % menjawab bahwa lingkungan tidak mendukung. 13,8% responden menjawab cukup

mendukung. 11,7% responden menjawab mendukung dan sisanya sejumlah 5,3% responden atau sekitar 5 orang menjawab cukup mendukung.

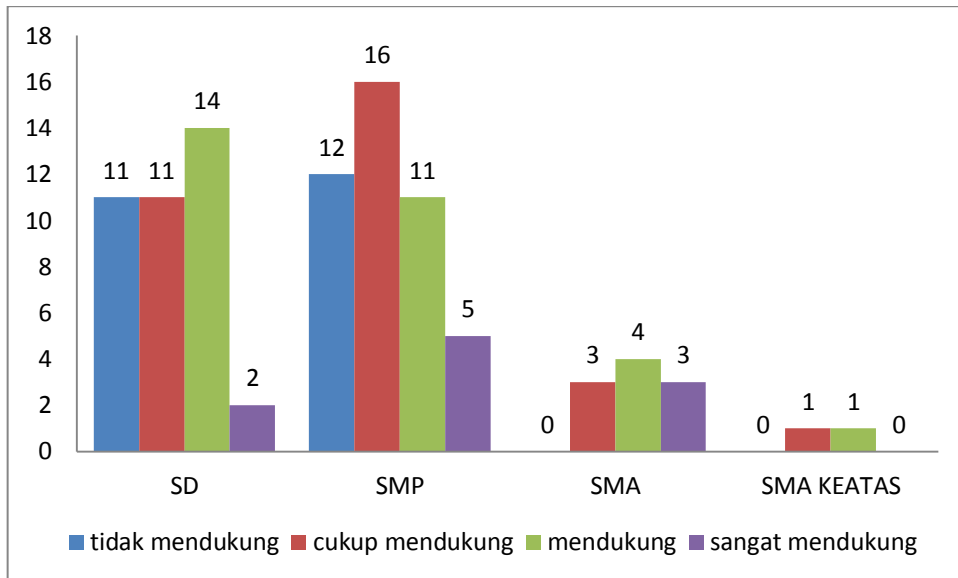
Responden dengan tingkat pendidikan SMA 3,2% menjawab cukup mendukung, 4,3% mendukung dan sisanya sejumlah 3,2% atau 3 responden menjawab sangat mendukung. Sementara itu responden dengan tingkat pendidikan SMA keatas masing-masing satu responden menjawab cukup mendukung dan mendukung.

Dari analisa diatas dapat terdapat korelasi negatif diantara tingkat pendidikan dengan pengaruh lingkungan terhadap penyandang disabilitas pada Pemiluakada Sleman 2015 silam. Tidak ada pengaruh signifikan yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara langsung mempengaruhi dukungan keluarga terhadap perilaku politik penyandang disabilitas pada Pemiluakada Sleman 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel tingkat pendidikan dan jawaban responden terkait lingkungan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.33

Bar Chart Antara Tingkat Pendidikan dan Lingkungan



Sumber : Data primer yang diolah (2016)

3. Jenis Kedisabilitas

1) Jenis kedisabilitas dengan sosialisasi Pemilukada

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitas dengan sosialisasi yang dilakukan KPUD Sleman pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.37

Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas dengan Sosialisasi

disabilitas * p1 Crosstabulation

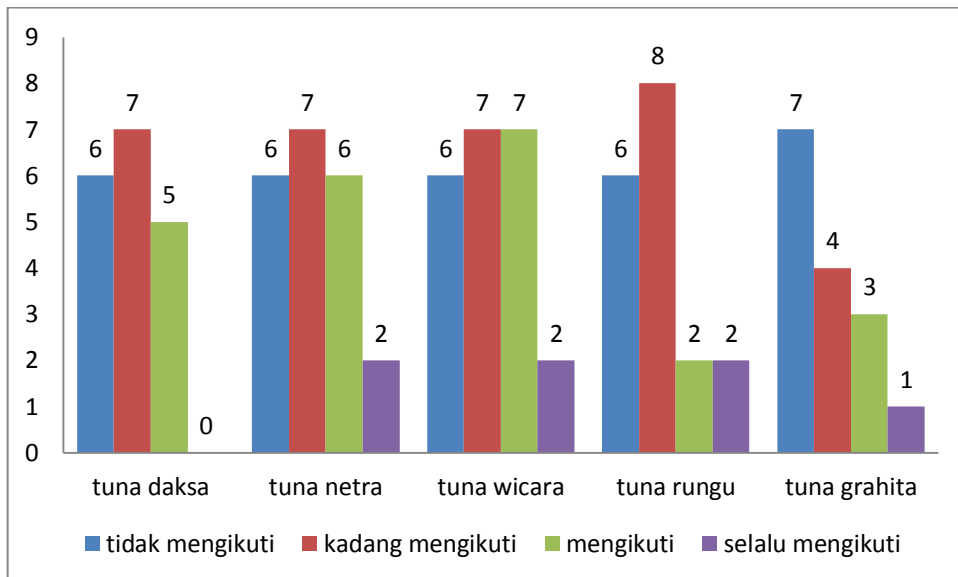
			p1				Total
			tidak mengikuti	kadang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
disabilitas tuna daksa	Count	6	7	5	0	18	
	% within disabilitas	33.3%	38.9%	27.8%	.0%	100.0%	
	% within p1	19.4%	21.2%	21.7%	.0%	19.1%	
	% of Total	6.4%	7.4%	5.3%	.0%	19.1%	
tuna netra	Count	6	7	6	2	21	
	% within disabilitas	28.6%	33.3%	28.6%	9.5%	100.0%	
	% within p1	19.4%	21.2%	26.1%	28.6%	22.3%	
	% of Total	6.4%	7.4%	6.4%	2.1%	22.3%	
tuna wicara	Count	6	7	7	2	22	
	% within disabilitas	27.3%	31.8%	31.8%	9.1%	100.0%	
	% within p1	19.4%	21.2%	30.4%	28.6%	23.4%	
	% of Total	6.4%	7.4%	7.4%	2.1%	23.4%	
tuna rungu	Count	6	8	2	2	18	
	% within disabilitas	33.3%	44.4%	11.1%	11.1%	100.0%	
	% within p1	19.4%	24.2%	8.7%	28.6%	19.1%	
	% of Total	6.4%	8.5%	2.1%	2.1%	19.1%	
tuna grahita	Count	7	4	3	1	15	
	% within disabilitas	46.7%	26.7%	20.0%	6.7%	100.0%	
	% within p1	22.6%	12.1%	13.0%	14.3%	16.0%	
	% of Total	7.4%	4.3%	3.2%	1.1%	16.0%	
Total	Count	31	33	23	7	94	
	% within disabilitas	33.0%	35.1%	24.5%	7.4%	100.0%	
	% within p1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	33.0%	35.1%	24.5%	7.4%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam sosialisasi pemilu untuk tuna daksa sejumlah 38,9% dan 33,3% tuna netra menjawab terkadang mengikuti. Tuna wicara 33,3% menjawab terkadang mengikuti sosialisasi Pemilukada. Tuna rungu 44,4% menjawab terkadang mengikuti dan tuna grahita sejumlah 46,7% menjawab tidak mengikuti sosialisasi Pemilukada.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa keikutsertaan penyandang disabilitas terhadap sosialisasi masih rendah. Beberapa hambatan yang penulis uraikan di bb sebelumnya memperlihatkan kendala dalam penyesuaian penyandang disabilitas memperoleh akses dan materi sosialisasi Pemilukada Sleman 2015. Dalam rangka mempermudah penerimaan materi sosialisasi, pihak KPU menyediakan alat peraga. Bagi penyandang disabilitas rungu, sosialisasi dibantu dengan alat peraga berupa “Ular Tangga Pemilu.” Bagi penyandang disabilitas netra, dilakukan simulasi menggunakan *template* dan bagi penyandang disabilitas wicara meminta bantuan guru untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas rungu dengan menggunakan isyarat. Selain itu terdapat CD (*compact disc*) sosialisasi yang berisikan informasi *audio visual* guna menjadi alat bantu sosialisasi terutama untuk penyandang disabilitas netra, rungu dan wicara.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait sosialisasi pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.34
Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitan dengan Sosialisasi



Sumber : data primer yang diolah (2016)

2) Jenis kedisabilitan dengan antusiasme

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitan dengan antusiasme penyandang disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.38
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Antusiasme
disabilitas * p2 Crosstabulation

			p2				Total
			tidak antusias	sedikit antusias	antusias	sangat antusias	
disabilitas	tuna daksa	Count	4	4	9	1	18
		% within disabilitas	22.2%	22.2%	50.0%	5.6%	100.0%
		% within p2	25.0%	18.2%	20.0%	9.1%	19.1%
		% of Total	4.3%	4.3%	9.6%	1.1%	19.1%
	tuna netra	Count	3	5	8	5	21
		% within disabilitas	14.3%	23.8%	38.1%	23.8%	100.0%
		% within p2	18.8%	22.7%	17.8%	45.5%	22.3%
		% of Total	3.2%	5.3%	8.5%	5.3%	22.3%
	tuna wicara	Count	3	5	12	2	22
		% within disabilitas	13.6%	22.7%	54.5%	9.1%	100.0%
		% within p2	18.8%	22.7%	26.7%	18.2%	23.4%
		% of Total	3.2%	5.3%	12.8%	2.1%	23.4%
	tuna rungu	Count	3	4	9	2	18
		% within disabilitas	16.7%	22.2%	50.0%	11.1%	100.0%
		% within p2	18.8%	18.2%	20.0%	18.2%	19.1%
		% of Total	3.2%	4.3%	9.6%	2.1%	19.1%
tuna grahita	Count	3	4	7	1	15	
	% within disabilitas	20.0%	26.7%	46.7%	6.7%	100.0%	
	% within p2	18.8%	18.2%	15.6%	9.1%	16.0%	
	% of Total	3.2%	4.3%	7.4%	1.1%	16.0%	
Total	Count	16	22	45	11	94	
	% within disabilitas	17.0%	23.4%	47.9%	11.7%	100.0%	
	% within p2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	17.0%	23.4%	47.9%	11.7%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat diinterpreasikan bahwa responden dengan jenis kedisabilitas daksa sejumlah 50% antusias dalam mengikuti rangkaian Pemilukada Sleman 2015. Diikuti tuna netra sejumlah 38,1%, tuna wicara 54,5%, tuna rungu 50% dan tuna grahita sejumlah 46,% yang mengaku antusias dalam mengikuti Pemilukada.

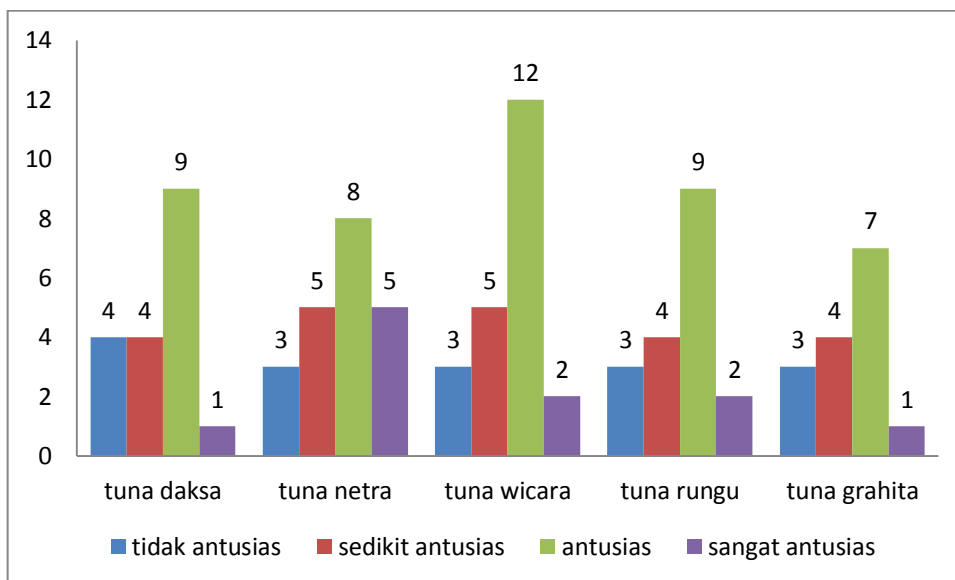
Dari analisa tersebut tidak ada pengaruh signifikan dari masing-masing jenis kedisabilitas dengan variabel antusiasme Pemilukada. Mayoritas

responden menunjukkan antusias yang cukup besar untuk mengikuti serangkaian kegiatan dalam Pemilukada Kabupaten Sleman 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait antusiasme keterlibatan pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.35

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitas dengan Antusiasme



Sumber : data primer yang diolah (2016)

3) Jenis Kedisabilitas Dengan Pemahaman Calon

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitas dengan pemahaman calon kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.39
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas dengan Pemahaman Calon
disabilitas * p3 Crosstabulation

			p3				Total
			tidak tahu	sedikit tahu	tahu	sangat tahu	
disabilitas tuna daksa	Count	6	4	7	1	18	
	% within disabilitas	33.3%	22.2%	38.9%	5.6%	100.0%	
	% within p3	23.1%	12.1%	25.9%	12.5%	19.1%	
	% of Total	6.4%	4.3%	7.4%	1.1%	19.1%	
tuna netra	Count	5	9	5	2	21	
	% within disabilitas	23.8%	42.9%	23.8%	9.5%	100.0%	
	% within p3	19.2%	27.3%	18.5%	25.0%	22.3%	
	% of Total	5.3%	9.6%	5.3%	2.1%	22.3%	
tuna wicara	Count	5	7	8	2	22	
	% within disabilitas	22.7%	31.8%	36.4%	9.1%	100.0%	
	% within p3	19.2%	21.2%	29.6%	25.0%	23.4%	
	% of Total	5.3%	7.4%	8.5%	2.1%	23.4%	
tuna rungu	Count	5	7	4	2	18	
	% within disabilitas	27.8%	38.9%	22.2%	11.1%	100.0%	
	% within p3	19.2%	21.2%	14.8%	25.0%	19.1%	
	% of Total	5.3%	7.4%	4.3%	2.1%	19.1%	
tuna grahita	Count	5	6	3	1	15	
	% within disabilitas	33.3%	40.0%	20.0%	6.7%	100.0%	
	% within p3	19.2%	18.2%	11.1%	12.5%	16.0%	
	% of Total	5.3%	6.4%	3.2%	1.1%	16.0%	
Total	Count	26	33	27	8	94	
	% within disabilitas	27.7%	35.1%	28.7%	8.5%	100.0%	
	% within p3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	27.7%	35.1%	28.7%	8.5%	100.0%	

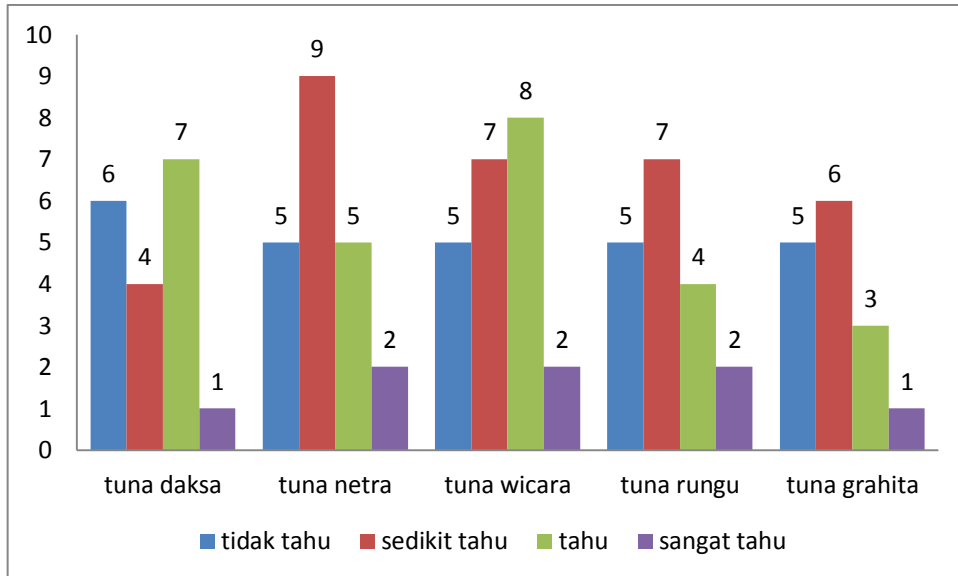
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kedisabilitas daksa 38,9% tahu akan calon kepala daerah. Tuna netra 42,9% menjawab sedikit tahu, diikuti tuna wicara sejumlah 36,4% tahu akan calon kepala daerah. Sisanya tuna rungu sejumlah 38,9% dan tuna grahita 40% menjawab tahu akan calon kepala daerah pada Pilkada Sleman 2015.

Pemahaman calon oleh penyandang disabilitas diketahui cukup rendah hal ini dikarenakan pemahaman dan serapan materi tentang calon kepala daerah terbatas karena keterbatasan fisik mereka. Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman terendah dialami oleh tuna netra, alasan tersebut cukup rasional karena memang media sosialisasi yang terbatas dan juga selama ini pelaksanaan sosialisasidengan cara mensimulasikan surat suara menggunakan *template* Pemilu Legislatif 2009 karena *template* simulasi pemilu tahun 2014 tidak ada. Petugas sosialisasi harus dengan sangat tekun untuk menjelaskan dan membimbing pemilih penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya. Karena hanya dengan mengandalkan suara saja, materi sulit untuk diterima secara mudah.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait pemahaman calon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015

Grafik. 3.36

Bar Chart Antara Jenis Kedisablitasan dengan Pemahaman Calon



Sumber :data primer yang diolah (2016)

4) Jenis Kedisabilitas dengan Kegiatan Kampanye

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitas dengan kegiatan kampanye pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.40

Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Kegiatan Kampanye

disabilitas * p4 Crosstabulation

		p4				Total
		tidak mengikuti	kadang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
disabilitas tuna daksa	Count	10	5	3	0	18
	% within disabilitas	55.6%	27.8%	16.7%	.0%	100.0%
	% within p4	17.2%	20.8%	30.0%	.0%	19.1%
	% of Total	10.6%	5.3%	3.2%	.0%	19.1%
tuna netra	Count	14	4	3	0	21
	% within disabilitas	66.7%	19.0%	14.3%	.0%	100.0%
	% within p4	24.1%	16.7%	30.0%	.0%	22.3%
	% of Total	14.9%	4.3%	3.2%	.0%	22.3%
tuna wicara	Count	12	7	3	0	22
	% within disabilitas	54.5%	31.8%	13.6%	.0%	100.0%
	% within p4	20.7%	29.2%	30.0%	.0%	23.4%
	% of Total	12.8%	7.4%	3.2%	.0%	23.4%
tuna rungu	Count	11	5	1	1	18
	% within disabilitas	61.1%	27.8%	5.6%	5.6%	100.0%
	% within p4	19.0%	20.8%	10.0%	50.0%	19.1%
	% of Total	11.7%	5.3%	1.1%	1.1%	19.1%
tuna grahita	Count	11	3	0	1	15
	% within disabilitas	73.3%	20.0%	.0%	6.7%	100.0%
	% within p4	19.0%	12.5%	.0%	50.0%	16.0%
	% of Total	11.7%	3.2%	.0%	1.1%	16.0%
Total	Count	58	24	10	2	94
	% within disabilitas	61.7%	25.5%	10.6%	2.1%	100.0%
	% within p4	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	61.7%				

Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan kampanye untuk tuna daksa sebesar 55,6% menjawab tidak mengikuti kegiatan kampanye. Tuna netra 66,7% menjawab tidak mengikuti kegiatan kampanye, tuna wicara sejumlah 54,5% menjawab tidak mengikuti kegiatan kampanye. Tuna rungu sejumlah 61,1% menjawab tidak

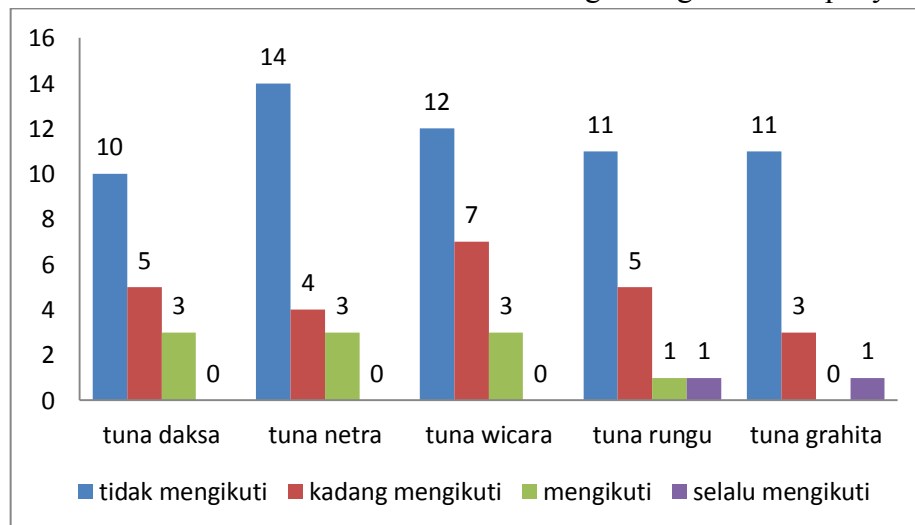
mengikutidana tuna grahita sejumlah 73,3% menjawab tidak mengikuti kegiatan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman.

Secara umum hambatan yang berarti bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti kampanye adalah faktor teknis dikarenakan keterbatasan fisik yang memaksa mereka tidak dapat melakukan aktivitas ketika tidak ada yang mendampinginya. Terlebih bagi penyandang penyandang disabilitas daksa yang memerlukan bantuan dari pihak keluarga maupun kerabat.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitasana dan jawaban responden terkait kegiatan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.37

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitasana dengan Kegiatan Kampanye



Sumber :data primer yang diolah (2016)

5) Jenis kedisabilitasana dengan Pemberian Hak Suara

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitasana dengan pemberian hak suara pada Pemilukada Kabupaten Sleman

2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.41
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Pemberian Hak Suara
disabilitas * p5 Crosstabulation

			p5		Total
			tidak memberikan suara	memberikan suara	
disabilitas	tuna daksa	Count	5	13	18
		% within disabilitas	27.8%	72.2%	100.0%
		% within p5	16.7%	20.3%	19.1%
		% of Total	5.3%	13.8%	19.1%
	tuna netra	Count	6	15	21
		% within disabilitas	28.6%	71.4%	100.0%
		% within p5	20.0%	23.4%	22.3%
		% of Total	6.4%	16.0%	22.3%
	tuna wicara	Count	6	16	22
		% within disabilitas	27.3%	72.7%	100.0%
		% within p5	20.0%	25.0%	23.4%
		% of Total	6.4%	17.0%	23.4%
	tuna rungu	Count	6	12	18
		% within disabilitas	33.3%	66.7%	100.0%
		% within p5	20.0%	18.8%	19.1%
		% of Total	6.4%	12.8%	19.1%
tuna grahita	Count	7	8	15	
	% within disabilitas	46.7%	53.3%	100.0%	
	% within p5	23.3%	12.5%	16.0%	
	% of Total	7.4%	8.5%	16.0%	
Total	Count	30	64	94	
	% within disabilitas	31.9%	68.1%	100.0%	
	% within p5	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	31.9%	68.1%	100.0%	

Dari tabel diatas dapat diinterpreasikan bahwa tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemberian Hak Suara tuna daksa sebesar 27,3% menjawab tidak memberikan hak suara dan 72,2% memberikan hak suara, diikuti tuna netra sebesar 28,6% tidak memberikan suara dan 71,4% memberikan hak

suara. Tuna wicara sejumlah 27,3% tidak memberikan hak suara dan 72,7% memberikan hak suara. Tuna rungu sejumlah 33,3% tidak memberikan dan hak suara 66,7% memberikan hak suara. Sementara itu untuk tuna grahita sejumlah 46,7% tidak memberikan hak suara dan 53,3% memberikan hak suara.

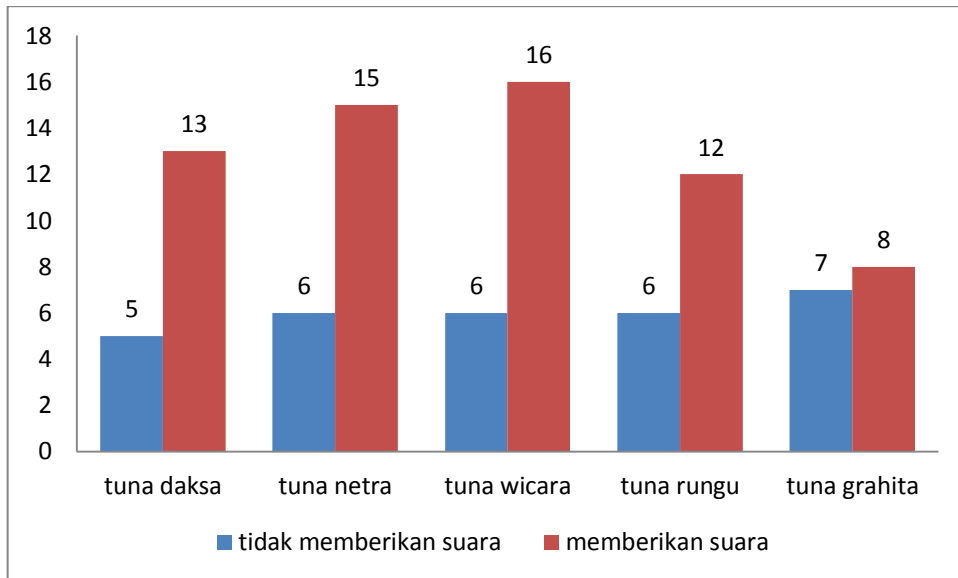
Para penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara, tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam menggunakan hak pilihnya. Hanya saja dia butuh isyarat atau colekan dari petugas ketika sudah waktunya memasuki bilik suara. Dari sebaran data diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kedisabilitas grahita dengan jumlah 60% tidak memberikan hak suara menempati jumlah terbesar dari jenis kedisabilitas lainnya. Hal ini dimungkinkan karena tuna grahita kurang mendapat perhatian khusus terkait dengan kedisabilitas tersebut dari penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Bagi penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara dan grahita

ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait pemberian hak suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3. 38

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitas dengan Pemberian Hak Suara



Sumber : data primer yang diolah (2016)

6) Jenis kedisabilitas dengan Kesadaran Diri Mengikuti Pilkada

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisa silang antara jenis kedisabilitas dengan kesadaran diri mengikuti pemilu dalam pilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.42
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Kesadaran Diri
disabilitas * p6 Crosstabulation

			p6				Total
			tidak sadar diri	kurang sadar diri	sadar diri	sangat sadar diri	
disabilitas	tuna daksa	Count	4	5	6	3	18
		% within disabilitas	22.2%	27.8%	33.3%	16.7%	100.0%
		% within p6	19.0%	22.7%	16.7%	20.0%	19.1%
		% of Total	4.3%	5.3%	6.4%	3.2%	19.1%
	tuna netra	Count	4	4	10	3	21
		% within disabilitas	19.0%	19.0%	47.6%	14.3%	100.0%
		% within p6	19.0%	18.2%	27.8%	20.0%	22.3%
		% of Total	4.3%	4.3%	10.6%	3.2%	22.3%
	tuna wicara	Count	4	4	9	5	22
		% within disabilitas	18.2%	18.2%	40.9%	22.7%	100.0%
		% within p6	19.0%	18.2%	25.0%	33.3%	23.4%
		% of Total	4.3%	4.3%	9.6%	5.3%	23.4%
	tuna rungu	Count	4	5	6	3	18
		% within disabilitas	22.2%	27.8%	33.3%	16.7%	100.0%
		% within p6	19.0%	22.7%	16.7%	20.0%	19.1%
		% of Total	4.3%	5.3%	6.4%	3.2%	19.1%
tuna grahita	Count	5	4	5	1	15	
	% within disabilitas	33.3%	26.7%	33.3%	6.7%	100.0%	
	% within p6	23.8%	18.2%	13.9%	6.7%	16.0%	
	% of Total	5.3%	4.3%	5.3%	1.1%	16.0%	
Total	Count	21	22	36	15	94	
	% within disabilitas	22.3%	23.4%	38.3%	16.0%	100.0%	
	% within p6	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	22.3%	23.4%	38.3%	16.0%	100.0%	

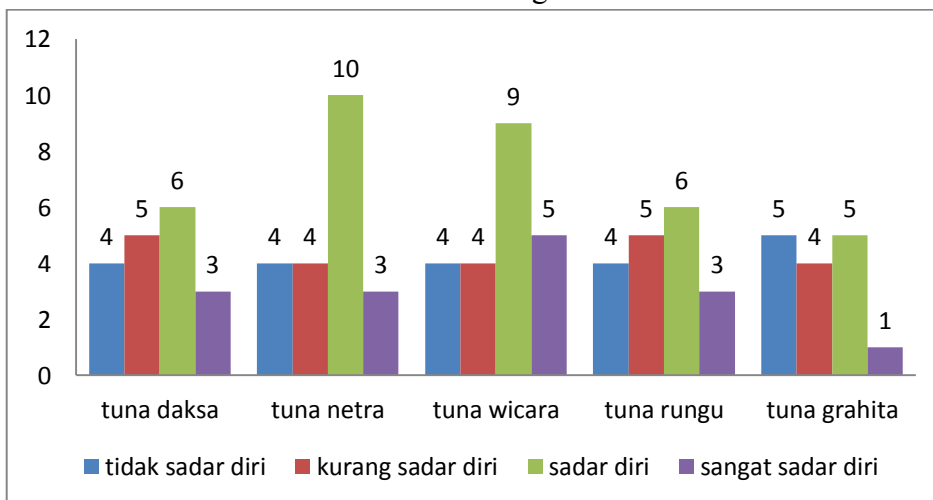
Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa distribusi jawaban untuk masing-masing jenis kedisabilitas terkait dengan kesadaran mengikuti pilkada untuk tuna daksa sejumlah 33.3% sadar diri, tuna netra 47,6% sadar diri, tuna wicara 40,9% sadar diri, tuna rungu 33,3% sadar diri dan terakhir tuna grahita 33,3% sadar diri.

Dari analisa tersebut tingkat kesadaran tertinggi ada pada jenis kedisabilitas netra dengan total 47,6% menjawab sadar diri. Meskipun keterbatasan penglihatan menjadi halangan utama namun mereka mempunyai kesadaran tersendiri untuk mengikuti Pilkada layaknya masyarakat lain. Hal itu diakomodir langsung oleh pihak KPU Sleman melalui sejumlah inovasi diantaranya surat *suara brailledan* buku pedoman sosialisasi dalam bentuk *braille*. Perhatian khusus yang diberikan pihak KPU Sleman terhadap penyandang netra terbukti berkorelasi positif akan kesadaran mengikuti Pilkada Sleman 2015.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait kesadaran mengikuti pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.39

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitas dengan Kesadaran Diri dalam Pilkada



Sumber : data primer yang diolah (2016)

7) Jenis kedisabilitas dengan Kegiatan Penghitungan Suara

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitas dengan kegiatan penghitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.43
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Kegiatan Penghitungan Suara
disabilitas * p7 Crosstabulation

		p7				Total		
		tidak mengikuti	kurang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti			
disabilitas	tuna daksa	Count	8	3	7	0	18	
		% within disabilitas	44.4%	16.7%	38.9%	.0%	100.0%	
		% within p7	21.1%	10.3%	33.3%	.0%	19.1%	
		% of Total	8.5%	3.2%	7.4%	.0%	19.1%	
		tuna netra	Count	8	7	5	1	21
		% within disabilitas	38.1%	33.3%	23.8%	4.8%	100.0%	
		% within p7	21.1%	24.1%	23.8%	16.7%	22.3%	
		% of Total	8.5%	7.4%	5.3%	1.1%	22.3%	
		tuna wicara	Count	8	6	6	2	22
		% within disabilitas	36.4%	27.3%	27.3%	9.1%	100.0%	
		% within p7	21.1%	20.7%	28.6%	33.3%	23.4%	
		% of Total	8.5%	6.4%	6.4%	2.1%	23.4%	
	tuna rungu	Count	7	7	2	2	18	
	% within disabilitas	38.9%	38.9%	11.1%	11.1%	100.0%		
	% within p7	18.4%	24.1%	9.5%	33.3%	19.1%		
	% of Total	7.4%	7.4%	2.1%	2.1%	19.1%		
	tuna grahita	Count	7	6	1	1	15	
	% within disabilitas	46.7%	40.0%	6.7%	6.7%	100.0%		
	% within p7	18.4%	20.7%	4.8%	16.7%	16.0%		
	% of Total	7.4%	6.4%	1.1%	1.1%	16.0%		
Total		Count	38	29	21	6	94	
		% within disabilitas	40.4%	30.9%	22.3%	6.4%	100.0%	
		% within p7	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
		% of Total	40.4%	30.9%	22.3%	6.4%	100.0%	

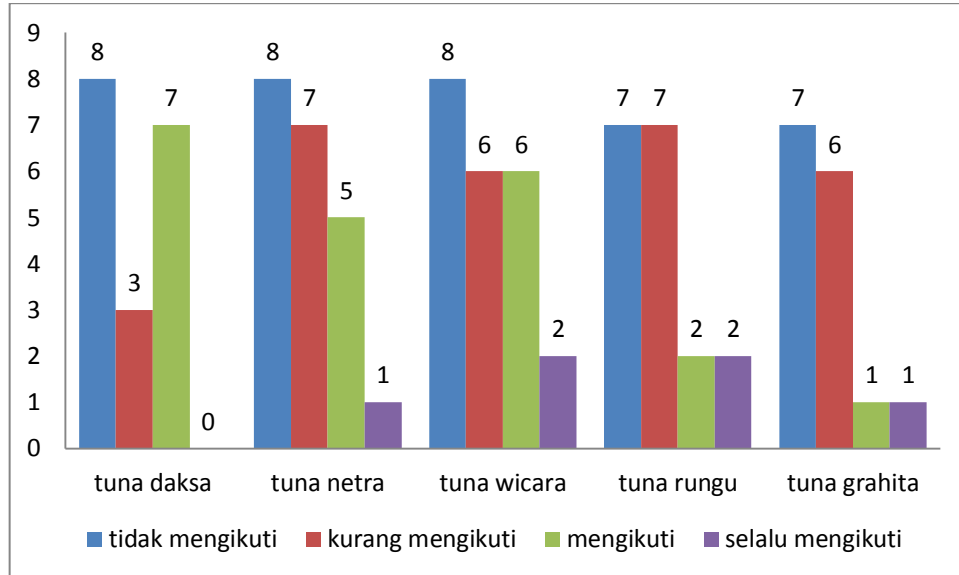
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisa silang terkait dengan kegiatan penghitungan suara dengan masing-masing jenis kedisabilitasan mempunyai korelasi negatif. Dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam data yang tersaji. Tuna daksa sebesar 38,9% menjawab mengikuti, tuna netra sebesar 33,3% menjawab kurang mengikuti, tuna wicara sebesar 36,4% menjawab tidak mengikuti, tuna rungu sejumlah 38,9% menjawab tidak mengikuti dan terakhir tuna grahita 46,7% menjawab tidak mengikuti.

Dari analisa tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi politik yang tertuang dalam kegiatan penghitungan suara terbesar ada pada penyandang daksa. Karena mayoritas responden cukup aktif terlibat dalam organisasi disabilitas yang dekat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Sleman ini sedikit banyak mempengaruhi tingkat pemahaman dan juga partisipasi untuk mengikuti proses pemungutan suara setelah hak suara diberikan.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitasan dan jawaban responden terkait kegiatan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.40

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitan dengan Kegiatan Penhitungan Suara



Sumber : data primer yang diolah (2016)

8) Jenis kedisabilitan dengan Kegiatan Politik Informal

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisa silang antara jenis kedisabilitan dengan keterlibatan kegiatan politik informal pada pemelukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.44
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Kegiatan Politik Informal
disabilitas * p8 Crosstabulation

			p8				Total
			tidak mengikuti	kurang mengikuti	mengikuti	selalu mengikuti	
disabilitas	tuna daksa	Count	8	4	6	0	18
		% within disabilitas	44.4%	22.2%	33.3%	.0%	100.0%
		% within p8	21.1%	11.4%	37.5%	.0%	19.1%
		% of Total	8.5%	4.3%	6.4%	.0%	19.1%
	tuna netra	Count	8	9	4	0	21
		% within disabilitas	38.1%	42.9%	19.0%	.0%	100.0%
		% within p8	21.1%	25.7%	25.0%	.0%	22.3%
		% of Total	8.5%	9.6%	4.3%	.0%	22.3%
	tuna wicara	Count	8	8	4	2	22
		% within disabilitas	36.4%	36.4%	18.2%	9.1%	100.0%
		% within p8	21.1%	22.9%	25.0%	40.0%	23.4%
		% of Total	8.5%	8.5%	4.3%	2.1%	23.4%
tuna rungu	Count	7	8	1	2	18	
	% within disabilitas	38.9%	44.4%	5.6%	11.1%	100.0%	
	% within p8	18.4%	22.9%	6.3%	40.0%	19.1%	
	% of Total	7.4%	8.5%	1.1%	2.1%	19.1%	
tuna grahita	Count	7	6	1	1	15	
	% within disabilitas	46.7%	40.0%	6.7%	6.7%	100.0%	
	% within p8	18.4%	17.1%	6.3%	20.0%	16.0%	
	% of Total	7.4%	6.4%	1.1%	1.1%	16.0%	
Total	Count	38	35	16	5	94	
	% within disabilitas	40.4%	37.2%	17.0%	5.3%	100.0%	
	% within p8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	40.4%	37.2%	17.0%	5.3%	100.0%	

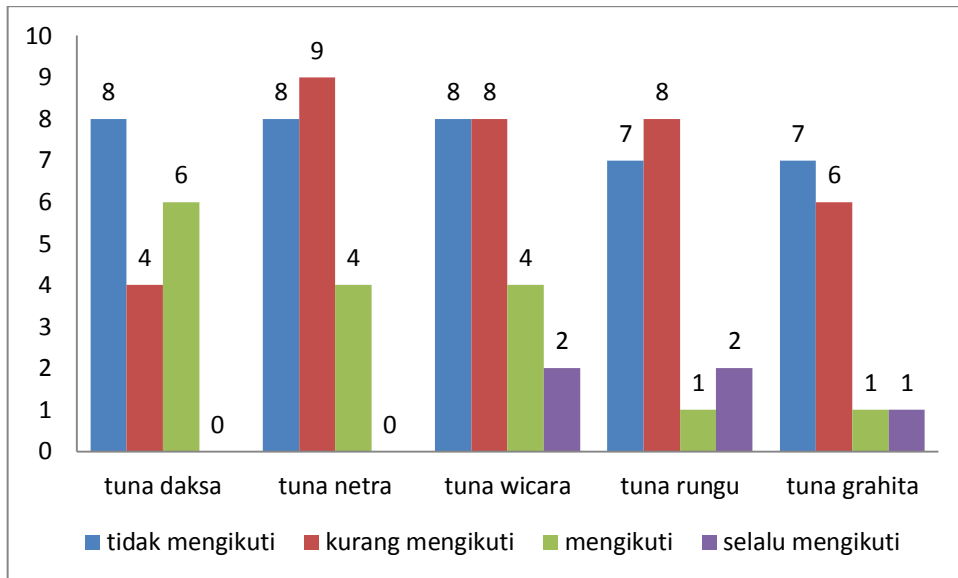
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan politik informal yang dilakukan oleh penyandang disabilitas masih sangatlah minim. Tuna daksa sejumlah 44,4% menjawab tidak mengikuti. Tuna netra 42,9% menjawab kurang mengikuti. Sebanyak 36,4% tuna wicara menjawab tidak mengikuti. 44,4% tuna rungu menjawab kurang mengikuti dan terakhir tuna grahita sejumlah 46,7% menjawab tidak mengikuti.

Salah satu indikator partisipasi politik dilakukan melalui kegiatan politik informal. Data di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih minim mengikuti kegiatan tersebut. Hanya beberapa penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang cacat PPDI dan terlibat dalam kegiatan politik informal yang tertuang melalui Kegiatan pendampingan demokrasi bagi penyandang disabilitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas dan advokasi penyediaan *reasonable accessibility* dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait kegiatan politik dan organisasi informal pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.41

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitas dengan Kegiatan Politik Informal



Sumber : data primer yang diolah (2016)

9) Jenis kedisabilitas dengan Informasi Pilkada

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitas dengan Informasi yang diterima penyandang disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.45
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitan Dengan Informasi Pilkada
disabilitas * p9 Crosstabulation

			p9				Total
			tidak cukup	sedikit cukup	cukup	sangat cukup	
disabilitas	tuna daksa	Count	9	6	3	0	18
		% within disabilitas	50.0%	33.3%	16.7%	.0%	100.0%
		% within p9	19.1%	18.2%	33.3%	.0%	19.1%
		% of Total	9.6%	6.4%	3.2%	.0%	19.1%
	tuna netra	Count	11	7	3	0	21
		% within disabilitas	52.4%	33.3%	14.3%	.0%	100.0%
		% within p9	23.4%	21.2%	33.3%	.0%	22.3%
		% of Total	11.7%	7.4%	3.2%	.0%	22.3%
	tuna wicara	Count	9	9	2	2	22
		% within disabilitas	40.9%	40.9%	9.1%	9.1%	100.0%
		% within p9	19.1%	27.3%	22.2%	40.0%	23.4%
		% of Total	9.6%	9.6%	2.1%	2.1%	23.4%
	tuna rungu	Count	9	6	1	2	18
		% within disabilitas	50.0%	33.3%	5.6%	11.1%	100.0%
		% within p9	19.1%	18.2%	11.1%	40.0%	19.1%
		% of Total	9.6%	6.4%	1.1%	2.1%	19.1%
tuna grahita	Count	9	5	0	1	15	
	% within disabilitas	60.0%	33.3%	.0%	6.7%	100.0%	
	% within p9	19.1%	15.2%	.0%	20.0%	16.0%	
	% of Total	9.6%	5.3%	.0%	1.1%	16.0%	
Total	Count	47	33	9	5	94	
	% within disabilitas	50.0%	35.1%	9.6%	5.3%	100.0%	
	% within p9	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	35.1%	9.6%	5.3%	100.0%	

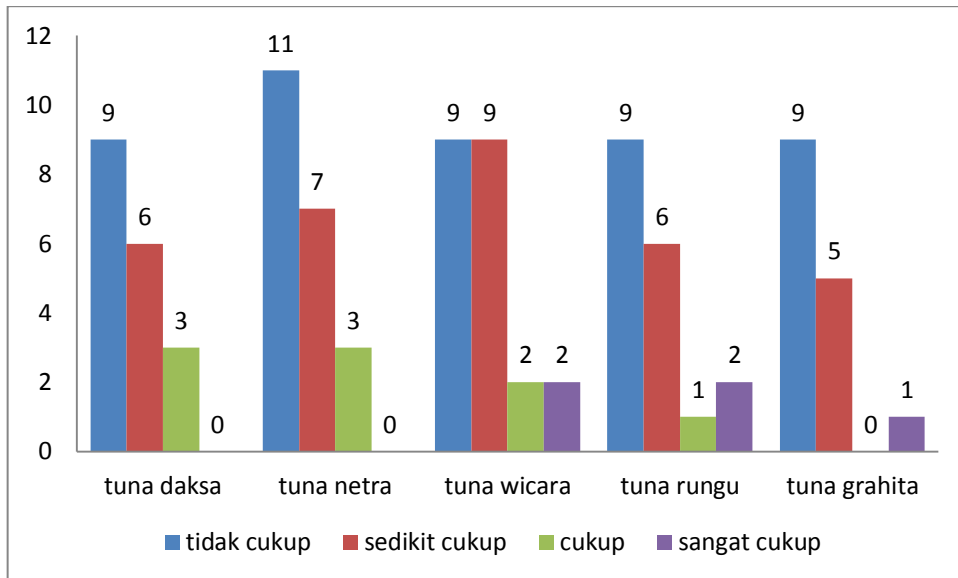
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tuna daksa sejumlah 50% menjawab informasi yang diberikan terkait pemilukada Sleman 2015 tidak cukup. Tuna netra sejumlah 52,4% menjawab tidak cukup. Tuna wicara 40,9% menjawab tidak cukup. Tuna rungu sejumlah 50% menjawab tidak cukup. Dan terakhir 60% tuna grahita menjawab tidak cukup.

Akses informasi yang diterima oleh penyandang disabilitas sangatlah tidak cukup. Mayoritas responden menjawab media informasi yang diterima masih sangatlah minim. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi tidak menyentuh mayoritas penyandang disabilitas. Sosialisasi dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Dalam rangka mempermudah penerimaan materi sosialisasi, pihak KPU menyediakan alat peraga. Bagi penyandang disabilitas runtu, sosialisasi dibantu dengan alat peraga berupa “Ular Tangga Pemilu.” Bagi penyandang disabilitas netra, dilakukan simulasi menggunakan *template* dan bagi penyandang disabilitas wicara meminta bantuan guru untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas runtu dengan menggunakan isyarat. Akan tetapi data membuktikan bahwa media sosialisasi tersebut belum efektif dalam penyampaian informasi terkait Pemilu pada Sleman 2015

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait informasi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.42

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitas dengan Informasi Pilkada



Sumber : data primer yang diolah (2016)

10) Jenis Kedisabilitas dengan Aksesibilitas Pilkada

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisa silang antara jenis kedisabilitas dengan aksesibilitas dalam pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.46
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Aksesibilitas Pilkada
disabilitas * p10 Crosstabulation

			p10				Total
			tidak mudah	cukup mudah	mudah	sangat mudah	
disabilitas	tuna daksa	Count	6	5	7	0	18
		% within disabilitas	33.3%	27.8%	38.9%	.0%	100.0%
		% within p10	21.4%	15.2%	26.9%	.0%	19.1%
		% of Total	6.4%	5.3%	7.4%	.0%	19.1%
	tuna netra	Count	6	9	4	2	21
		% within disabilitas	28.6%	42.9%	19.0%	9.5%	100.0%
		% within p10	21.4%	27.3%	15.4%	28.6%	22.3%
		% of Total	6.4%	9.6%	4.3%	2.1%	22.3%
	tuna wicara	Count	6	6	8	2	22
		% within disabilitas	27.3%	27.3%	36.4%	9.1%	100.0%
		% within p10	21.4%	18.2%	30.8%	28.6%	23.4%
		% of Total	6.4%	6.4%	8.5%	2.1%	23.4%
	tuna rungu	Count	5	7	4	2	18
		% within disabilitas	27.8%	38.9%	22.2%	11.1%	100.0%
		% within p10	17.9%	21.2%	15.4%	28.6%	19.1%
		% of Total	5.3%	7.4%	4.3%	2.1%	19.1%
tuna grahita	Count	5	6	3	1	15	
	% within disabilitas	33.3%	40.0%	20.0%	6.7%	100.0%	
	% within p10	17.9%	18.2%	11.5%	14.3%	16.0%	
	% of Total	5.3%	6.4%	3.2%	1.1%	16.0%	
Total	Count	28	33	26	7	94	
	% within disabilitas	29.8%	35.1%	27.7%	7.4%	100.0%	
	% within p10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	29.8%	35.1%	27.7%	7.4%	100.0%	

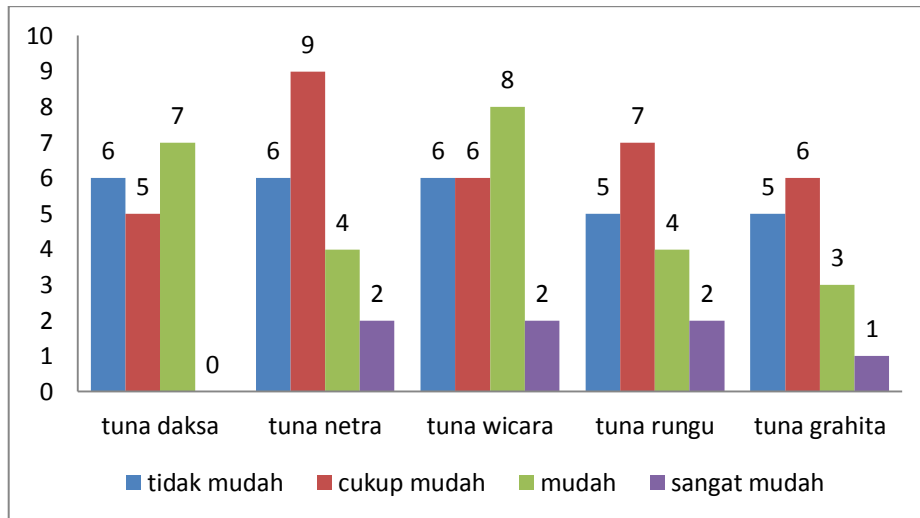
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kedisabilitas daksa menjawab 33,3% menjawab tidak mudah. Tuna netra menjawab cukup mudah dengan 42,9%. Tuna wicara sebanyak 36,4% menjawab mudah. Tuna rungu sejumlah 38,9% cukup mudah. Dan terakhir 40% responden tuna grahita menjawab cukup mudah.

Menurut keterangan salah satu responden di TPS 17 masih menempatkan kotak suara dengan ketinggian lebih dari 100 (seratus) cm. Hal ini menyulitkan seorang penyandang disabilitas daksa dalam memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya. Selain itu ditemukan masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak diperkenankan membawa pendamping yang dipilihnya sendiri, dan harus didampingi oleh petugas KPPS. Selama proses pemungutan suara didampingi oleh petugas, dengan alasan bahwa petugas telah mengucapkan sumpah sehingga tidak akan menyelewengkan tugasnya. Namun demikian, beberapa pendamping di TPS tidak mengisi dan menandatangani formulir C3.

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitas dan jawaban responden terkait aksesibilitas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.43

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilitas dengan Aksesibilitas



Sumber : data primer yang diolah (2016)

11) Jenis kedisabilitas dengan Lingkungan

Analisa berikut akan menjelaskan hubungan antara variabel jenis kedisabilitas dengan lingkungan pada Pemilukada Kabupaten Sleman 2015. Hasil tabulasi silang antar dua variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.47
Analisa Silang Antara Jenis Kedisabilitas Dengan Lingkungan
disabilitas * p11 Crosstabulation

			p11				Total
			tidak mendukung	cukup mendukung	mendukung	sangat mendukung	
disabilitas	tuna daksa	Count	4	5	6	3	18
		% within disabilitas	22.2%	27.8%	33.3%	16.7%	100.0%
		% within p11	17.4%	16.1%	20.0%	30.0%	19.1%
		% of Total	4.3%	5.3%	6.4%	3.2%	19.1%
	tuna netra	Count	4	9	6	2	21
		% within disabilitas	19.0%	42.9%	28.6%	9.5%	100.0%
		% within p11	17.4%	29.0%	20.0%	20.0%	22.3%
		% of Total	4.3%	9.6%	6.4%	2.1%	22.3%
	tuna wicara	Count	5	6	9	2	22
		% within disabilitas	22.7%	27.3%	40.9%	9.1%	100.0%
		% within p11	21.7%	19.4%	30.0%	20.0%	23.4%
		% of Total	5.3%	6.4%	9.6%	2.1%	23.4%
	tuna rungu	Count	5	6	5	2	18
		% within disabilitas	27.8%	33.3%	27.8%	11.1%	100.0%
		% within p11	21.7%	19.4%	16.7%	20.0%	19.1%
		% of Total	5.3%	6.4%	5.3%	2.1%	19.1%
tuna grahita	Count	5	5	4	1	15	
	% within disabilitas	33.3%	33.3%	26.7%	6.7%	100.0%	
	% within p11	21.7%	16.1%	13.3%	10.0%	16.0%	
	% of Total	5.3%	5.3%	4.3%	1.1%	16.0%	
Total	Count	23	31	30	10	94	
	% within disabilitas	24.5%	33.0%	31.9%	10.6%	100.0%	
	% within p11	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	24.5%	33.0%	31.9%	10.6%	100.0%	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kedisabilitas daksa 33,3% menjawab lingkungan maupun keluarga mendukung dalam Pemilukada Sleman 2015. Diikuti sejumlah 42,9% tuna netra menjawab cukup mendukung. Tuna wicara 40,9% menjawab mendukung.33,3% tuna rungu menjawab cukup mendukung dan terakhir tuna grahita sejumlah 33,3% menjawab cukup mendukung.

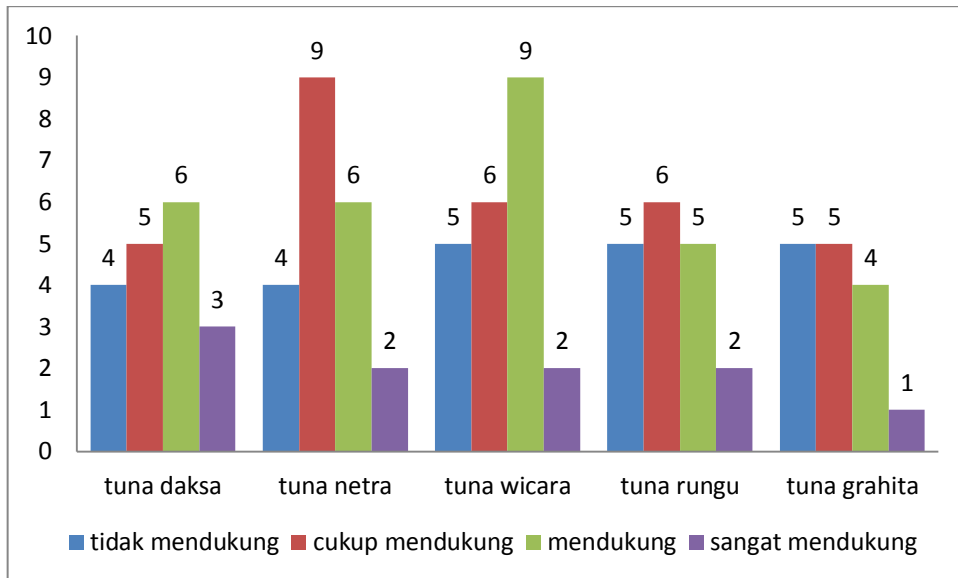
Dari analisa tersebut dapat dijelaskan bahwa lingkungan pada Pemiluakada Sleman 2015 cukup baik. Faktor lingkungan turut mempengaruhi partisipasi politik para penyandang disabilitas karena kedisabilitasannya mereka menuntut bantuan dari keluarga maupun lingkungan terdekatnya. Namun beberapa responden masih mengeluhkan bahwa lingkungan tidak mendukungnya. Berdasarkan temuan lapangan dan juga keterangan yang diperoleh dari PPDI bahwasanya ada beberapa keluarga yang memang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan bagi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas karena alasan psikologis atau aib bagi keluarga tersebut, terutama dengan penyandang disabilitas grahita yang memiliki gangguan jiwa.

“ada beberapa teman kita penyandang disabilitas yang terpaksa tidak mengikuti pemilihan karena keluarganya tidak mengajaknya. Entah karena malu atau apa saya tidak tahu” (wawancara dengan pengurus PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Adapun bar chart berikut memperlihatkan analisis tabulasi silang variabel jenis kedisabilitasannya dan jawaban responden terkait lingkungan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015.

Grafik. 3.44

Bar Chart Antara Jenis Kedisabilan dengan Lingkungan



Sumber : data primer yang diolah (2016)

D. Hasil Analisa Korelasi

Hasil analisa korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Analisa berikut menjelaskan antara hubungan variabel informasi, aksesibilitas dan lingkungan terhadap partisipasi politik dalam Pemiluakada Sleman 2015.

Tabel 3.48
 Hasil Korelasi Partisipasi dengan Informasi, Aksesibilitas dan Lingkungan

		Correlations			
		partisipasi	informasi	aksesibilitas	lingkungan
partisipasi	Pearson Correlation	1	.903**	.959**	.946**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94
informasi	Pearson Correlation	.903**	1	.848**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94
aksesibilitas	Pearson Correlation	.959**	.848**	1	.924**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94
lingkungan	Pearson Correlation	.946**	.856**	.924**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel dependent (Y) ; partisipasi

Variabel independent (X) ; informasi, aksesibilitas dan lingkungan

Berdasarkan data diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai probabilitas signifikansi untuk variabel informasi (X_1) sebesar 0,000 dengan nilai alpha 0.903, maka untuk mempertimbangkan keputusan adalah nilai probabilitas signifikansi lebih kecil daripada nilai alpha yakni $0,000 < 0,903$ dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara partisipasi dengan variabel informasi dalam Pemiluakada Sleman 2015. Selain itu hasil nilai positif pada angka 0,930 menunjukkan bahwa korelasi tersebut bersifat positif artinya bahwa semakin baik informasi yang diserap semakin baik pula partisipasi yang dilakukan penyandang disabilitas pada Pemiluakada 2015.

Selanjutnya diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi untuk variabel aksesibilitas (X_2) sebesar 0,000 dengan nilai alpha 0,959, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas memiliki korelasi kuat dengan partisipasi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam Pemiluakada Sleman 2015. Angka positif menunjukkan korelasi yang bersifat positif, artinya semakin baik aksesibilitas maka makin baik pula partisipasi politik yang dilakukan penyandang disabilitas pada Pemiluakada Sleman tahun 2015.

Nilai probabilitas signifikansi untuk variabel lingkungan dari data diatas menunjukkan angka 0,000 dengan nilai alpha sebesar 0,946. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada korelasi kuat yang bersifat positif antara partisipasi dengan pengaruh lingkungan dalam hal ini seperti keluarga, kerabat maupun tetangga dalam memberikan bantuan terhadap penyandang disabilitas untuk turut serta dalam proses Pemiluakada Sleman 2015. Semakin minim lingkungan membantu makin minim pula partisipasi yang diberikan dan sebaliknya makin besar bantuan yang diberikan makin besar pula partisipasi yang ditunjukkan.

Dari ketiga variabel diatas dapat diketahui disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki korelasi kuat yang bersifat positif dalam membentuk partisipasi politik para penyandang disabilitas dalam keikutsertaan mereka pada Pemiluakada Sleman 2015.

E. Hasil Partisipasi Pemilih Disabilitas

Tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 diukur menggunakan analisa SPSS adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49
Jumlah Mean Median Minimum dan Maksimum Dari Jawaban Responden statistics

N	Valid	94
	Missing	0
Mean		20.7340
Median		20.5000
Minimum		10.00
Maximum		40.00
Sum		1949.00

Keterangan:

- Mean adalah nilai rata-rata dari jawaban responden sebesar 20.7340
- Median adalah nilai tengah dari jawaban responden sebesar 20.5000
- Nilai minimum atau nilai terkecil dari jumlah jawaban responden sebesar 10
- Nilai maksimum atau nilai terbesar dari jumlah responden sebesar 40
- N merupakan jumlah responden sebesar 94

Berdasarkan tabel diatas nilai mean (rata-rata) dari jawaban responden adalah sebesar 20,734 atau sekitar 21%. Selanjutnya dalam penentuan diagram kategori atau interval kelas digunakan rumus sebagai berikut ;

$$Interval = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{banyaknyakriteria}}$$

$$= \frac{40 - 10}{4}$$
$$= 7,5 \text{ interval}$$

Keterangan :

- a. Jumlah pertanyaan : 10
- b. Jumlah banyak kriteria : 4
- c. Jumlah skor : 1-4
- d. Skor tertinggi dari jumlah pertanyaan : 40
- e. Skor terendah dari jumlah pertanyaan : 10

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat diketahui dan dikategorikan kelas interval sebagai berikut :

- a. 10– 17,5 (sangat rendah)
- b. 17,5 - 25 (rendah)
- c. 25 – 32,5 (tinggi)
- d. 32,5 - 40 (sangat tinggi)

Diketahui bahwa nilai rata-rata dari jawaban responden adalah sebesar 20,734 dan termasuk dalam kategori rendah. Maka dari itu dapat disimpulkan pula bahwasanya secara keseluruhan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilukada Sleman 2015 adalah rendah.

Akan tetapi tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang ditunjukkan dalam pemberian suara atau penggunaan hak pilih tergolong tinggi. Tercatat sekitar 68% telah menggunakan hak pilihnya, sementara 32% tidak menggunakan hak suaranya. Fakta ini menunjukkan bahwa kemauan untuk turut serta dalam memberikan suara dan turut serta menentukan pilihan politis cukup baik.

Dari beberapa alat ukur yang tertuang dalam kuisioner mengindikasikan pola partisipasi yang rendah. Hasil analisa korelasi variabel informasi dengan partisipasi menunjukkan angka 0,930 yang menunjukkan korelasi kuat yang bersifat positif artinya bahwa ada pengaruh yang kuat dan berbanding positif jika informasi yang diterima semakin baik maka kecenderungan partisipasi politik akan semakin baik, namun sebaliknya jika informasi buruk maka partisipasi cenderung buruk. Akses informasi terkait Pilkada yang tertuang dalam sosialisasi pemilukada dirasakan oleh penyandang disabilitas tidaklah cukup. Hal ini berimbas kepada serapan materi dan pemahaman yang kurang bagi penyandang disabilitas untuk memahami setiap detil informasi pemilu.

Perbedaan jenis kedisabilitasan tentunya memerlukan media informasi yang berbeda dan dalam rangka mempermudah penerimaan materisozialisasi, pihak KPU menyediakan alat peraga. Bagi penyandangdisabilitas rungu, sosialisasi dibantu dengan alat peraga berupa "*Ular Tangga Pemilu*". Bagi penyandang disabilitas netra,dilakukan simulasi menggunakan *template* dan bagi penyandangdisabilitas wicara meminta bantuan guru untuk menyampaikanmateri sosialisasi kepada penyandang disabilitas rungu dengan menggunakan isyarat. Selain itu terdapat CD (*compact disc*) sosialisasi yang berisikan informasi *audio visual* guna menjadi alat bantu sosialisasi terutama untuk penyandang disabilitas netra, rungu dan wicara.

Namun sesuai dengan temuan peneliti di lapangan sejumlah inovasi tersebut belum mampu didistribusikan dan menyentuh setiap masyarakat inklusi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Hal inilah yang kemudian berimbas

pada rendahnya kualitas pemahaman penyandang disabilitas terhadap Pemilu 2015 dan terlebih berdampak pada tingkat partisipasi politik yang rendah pula.

Faktor kedua yang menjadi kendala dan penyebab dari rendahnya partisipasi adalah faktor aksesibilitas. Masyarakat penyandang disabilitas merupakan golongan masyarakat yang terkendala dalam segi fisik dan mobilitas yang membuat mereka tidak bisa beraktifitas layaknya masyarakat lain. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi untuk variabel aksesibilitas (X_2) sebesar 0,000 dengan nilai alpha 0,959, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas memiliki korelasi kuat dengan partisipasi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam Pemilu Sleman 2015.

Wujud aksesibilitas dapat dilihat salah satunya melalui sarana dan prasarana pemilu yang berperspektif disabilitas. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu memuat ketentuan bahwa TPS harus memberikankemudahan akses bagi penyandang disabilitas, tapi masih banyak TPS yang masih jauh dari aksesibel, Secara umum hambatan yang berarti bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya adalah faktor teknis dikarenakan keterbatasan fisik yang memaksa mereka tidak dapat melakukan aktivitas ketika tidak ada yang mendampinginya. Penyandang disabilitas daksa ataupun pengguna kursi roda yang memiliki kesulitan dalam mengakses TPS jika terdapat TPS yang tidak aksesibel.

"saya tidak nyoblos kemarin pemilu, rumah saya jauh dengan tempat nyoblos. Tidak ada yang mengantar" (wawancara Yanto penyandang disabilitas ganda tanggal 16 Maret 2016)

Temuan PPDI juga relevan dengan kondisi ini bahwa masih terdapat TPS yang belum menempatkan kotak suaradi bawah ketinggian 100cm, akibatnya penyandangdisabilitas daksa tidak mampu memasukkan surat suarayang telah dicoblosnya secara mandiri karena terlalu tinggidan harus dibantu oleh petugas atau pendamping yang telahdipilihnya sendiri.

“kita kecewa kemarin bahwa petugas TPS banyak yang belum mengerti tentang prosedur penyiapan TPS yang aksesibel. Kami menemukan beberapa TPS yang kotak suaranya tingginya lebih dari 100 cm. ini sangat mempersulit pengguna kursi roda untuk bergerak secara mandiri” (wawancara PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Hal inilah yang kemudian membuat faktor aksesibilitas memegang pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik, mayoritas responden tidak memberikan suara dengan salah satu alasan tidak bisa mengakses TPS secara mandiri tanpa bantuan orang lain.

Faktor ketiga yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu pada Sleman 2015 yaitu lingkungan. Lingkungan disini mempunyai konteks keluarga, kerabat maupun orang yang kesehariannya dekat dengan penyandang disabilitas. Lingkungan menjadi signifikan dalam pengaruhnya membentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dikarenakan mobilitas yang dilakukan oleh sebagian penyandang disabilitas dibantu oleh lingkungan atau keluarga sekitarnya. Dukungan mmoriil juga berpengaruh membentuk stigma posisiif penyandang disabilitas untuk merasa terlibat aktifitas yang masyarakat lain lakukan.

Banyak keluarga yang secara psikologis menganggap bahwa anggota keluarga yang mempunyai hambatan disabilitas adalah orang-orang yang

terpinggirkan. Hal inilah yang kerap kali menjadi penghalang bagi para penyandang disabilitas untuk turut serta memberikan hak suara pada pemilih. Tentu saja hal ini berlawanan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan temuan lapangan dan juga keterangan yang diperoleh dari PPDI bahwasanya ada beberapa keluarga yang memang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan bagi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas karena alasan psikologis atau aib bagi keluarga tersebut, terutama dengan penyandang disabilitas grahita yang memiliki gangguan jiwa.

“ada beberapa teman kita penyandang disabilitas yang terpaksa tidak mengikuti pemilihan karena keluarganya tidak mengajaknya. Entah karena malu atau apa saya tidak tahu” (wawancara dengan pengurus PPDI tanggal 17 Maret 2016)

Keterbatasan fisik bukanlah menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini yang membuat partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu pada 2015 cenderung rendah.